



PEREKONOMIAN GLOBAL

Isu, Kebijakan, dan Prospek Masa Depan



Syarifuddin; Ading Rahman Sukmara; Yulianita Rahayu; Masyhuri; Dr. Lilia
Pasca Riani, M.Sc; Heriyana; Sony Tian Dhora, S.E., M.E.; Frans Antoni Sihite,
S.Pd.,M.M; Juju Zuhriatusobah

PEREKONOMIAN GLOBAL: ISU, KEBIJAKAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN

Oleh

Syarifuddin; Ading Rahman Sukmara; Yulianita Rahayu;
Masyhuri; Dr. Lilia Pasca Riani, M.Sc; Heriyana; Sony Tian
Dhora, S.E., M.E.; Frans Antoni Sihite, S.Pd.,M.M; Juju
Zuhriatusobah



CENDEKIA
— PUBLISHER —

PEREKONOMIAN GLOBAL: ISU, KEBIJAKAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN

Penulis:

Syarifuddin; Ading Rahman Sukmara; Yulianita Rahayu;
Masyhuri; Dr. Lilia Pasca Riani, M.Sc; Heriyana; Sony Tian
Dhora, S.E., M.E.; Frans Antoni Sihite, S.Pd.,M.M; Juju
Zuhriatusobah

Desain Cover:

Hendra Putra

Editor:

Sri Wahyuni, SE.,M.Si

ISBN: 978-623-8757-78-7

September 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-
Undang

Copyright © 2025
by Penerbit Cendekia Publisher
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

CENDEKIA PUBLISHER

(PT. Master Nusantara Grup)

Perumahan Bumi Findaria Mas 1 Blok J No. 35, Pamanjengan
Kec. Monconglo, Kab. Maros, Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku *Perekonomian Global: Isu, Kebijakan, dan Prospek Masa Depan* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ekonomi global yang terus berubah dan kompleks.

Di era globalisasi ini, perekonomian dunia mengalami berbagai tantangan sekaligus peluang. Perkembangan teknologi, perdagangan internasional, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan dan strategi ekonomi negara-negara di dunia. Buku ini hadir untuk menjadi panduan bagi pembaca, baik akademisi, pelaku bisnis, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana isu-isu global memengaruhi ekonomi nasional dan kehidupan sehari-hari.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan mengenai isu-isu ekonomi utama, kebijakan yang diterapkan berbagai negara, serta prospek masa depan perekonomian global. Analisis yang disajikan menggabungkan teori ekonomi, data terkini, dan praktik nyata, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas sekaligus aplikatif.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik

dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di edisi mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi dalam memahami dan menghadapi tantangan perekonomian global.

Makassar, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Perekonomian Global.....	1
Bab 2 Dinamika Ekonomi Global Saat Ini.....	6
Bab 3 Isu Utama dalam Perekonomian Global	15
Bab 4 Peran Institusi Keuangan International	29
Bab 5 Ekonomi Digital dan Revolusi Industri 4.0.....	36
Bab 6 Perdagangan International dan Kebijakan Perdagangan	46
Bab 7 Isu Geopolitik dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Global	59
Bab 8 Kebijakan Ekonomi Makro Global	69
Bab 9 Ekonomi Berkelanjutan dan Pembangunan Hijau.....	82
Bab 10 Dampak Krisis Global Terhadap Ekonomi Dunia	100
Bab 11 Prospek Ekonomi Global di Masa Depan	113

Bab 1

Perekonomian Global

(Syarifuddin)

A. Konsep Dasar Perekonomian Global

Perekonomian global adalah suatu sistem yang mencakup hubungan ekonomi antarnegara di seluruh dunia, baik dalam bentuk perdagangan barang dan jasa, aliran modal, migrasi tenaga kerja, maupun pertukaran teknologi dan informasi. Sistem ini terbentuk karena adanya keterkaitan dan ketergantungan antarnegara yang semakin intensif seiring berkembangnya globalisasi.

Perekonomian global tidak lagi dapat dipandang sebagai sekumpulan perekonomian nasional yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia merupakan jaringan kompleks yang saling terhubung, di mana kebijakan ekonomi di suatu negara dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap negara lain. Contohnya adalah krisis keuangan global 2008 yang bermula di Amerika Serikat, namun dengan cepat menyebar ke Eropa, Asia, dan negara-negara berkembang. Dalam konteks akademik, perekonomian global dipahami sebagai suatu global economic system yang ditandai oleh:

1. Integrasi pasar internasional dalam perdagangan, investasi, dan keuangan.
2. Interdependensi ekonomi, di mana stabilitas suatu negara berpengaruh pada stabilitas global.
3. Mobilitas faktor produksi yang semakin tinggi, khususnya modal dan tenaga kerja.
4. Peran lembaga internasional dalam mengatur dan mengawasi dinamika ekonomi global.

Dengan demikian, perekonomian global tidak hanya berbicara tentang hubungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, sosial, dan teknologi yang turut memengaruhi arah perkembangan ekonomi dunia.

B. Sejarah Perkembangan Ekonomi Dunia

Perkembangan perekonomian global dapat ditelusuri melalui beberapa fase penting:

1. Era Merkantilisme (1500-1750)

Pada periode ini, negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris melakukan ekspansi perdagangan dan kolonialisme. Kekayaan negara diukur dari akumulasi emas dan perak. Kebijakan ekonomi berorientasi pada proteksionisme dan dominasi perdagangan.

2. Revolusi Industri (1750-1850)

Revolusi industri di Inggris menandai transformasi besar dalam produksi, dengan penggunaan mesin uap, industrialisasi tekstil, dan transportasi modern. Perdagangan internasional meningkat pesat, ditopang oleh kolonialisme dan liberalisasi ekonomi.

3. Era Kapitalisme Klasik (abad ke-19 - awal abad ke-20)

Gagasan Adam Smith dan David Ricardo tentang free trade mendorong terbentuknya perdagangan bebas antarnegara. Globalisasi awal ini ditandai dengan meningkatnya integrasi pasar keuangan dan perdagangan lintas batas.

4. Krisis Besar dan Perang Dunia (1929-1945)

Depresi Besar 1929 menandai kerentanan sistem kapitalisme global. Perang Dunia I dan II menyebabkan disrupsi ekonomi besar-besaran, menurunkan perdagangan internasional, serta memunculkan proteksionisme ekstrem.

5. Era Bretton Woods (1945-1971)

Setelah Perang Dunia II, dibentuk sistem Bretton Woods dengan pendirian IMF dan World Bank, serta penggunaan

dolar AS sebagai mata uang internasional. Sistem ini menciptakan stabilitas moneter global meskipun akhirnya runtuh pada 1971.

6. Globalisasi Modern (1970-2000-an)

Perkembangan teknologi komunikasi, deregulasi pasar keuangan, dan liberalisasi perdagangan memperkuat integrasi ekonomi global. Negara berkembang mulai berperan lebih besar melalui industrialisasi dan ekspor.

7. Era Ekonomi Digital dan Disrupsi (2000-sekarang)

Abad ke-21 ditandai dengan transformasi digital, munculnya ekonomi berbasis teknologi (e-commerce, fintech, AI, blockchain), serta tantangan baru seperti krisis iklim, pandemi global, dan geopolitik.

C. Globalisasi dan Integrasi Ekonomi

Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui peningkatan interaksi antarnegara di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam perekonomian global, globalisasi mendorong terciptanya integrasi pasar internasional yang ditandai dengan hilangnya sebagian besar hambatan perdagangan dan meningkatnya mobilitas modal. Bentuk integrasi ekonomi global dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Integrasi Perdagangan

Melalui perjanjian perdagangan bebas seperti WTO, ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

2. Integrasi Keuangan

Ditandai dengan aliran modal yang bebas, investasi asing langsung (FDI), dan pasar modal global.

3. Integrasi Produksi

Perusahaan multinasional membangun rantai pasok global (global supply chains) dengan produksi yang tersebar di berbagai negara.

4. Integrasi Tenaga Kerja

Migrasi internasional semakin meningkat, baik untuk tenaga kerja terampil maupun tidak terampil.

Namun, integrasi ekonomi global tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga risiko. Manfaatnya antara lain peningkatan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan akses terhadap teknologi. Sementara risikonya meliputi kerentanan terhadap krisis global, meningkatnya kesenjangan antarnegara, dan ketergantungan berlebihan pada pasar internasional.

Referensi

- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Bhagwati, J. (2004). *In Defense of Globalization*. Oxford University Press.
- International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences*. Washington, DC: IMF.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). Pearson.
- Oxfam International. (2023). *Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-Rich Now to Fight Inequality*. Oxford: Oxfam Briefing Paper.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W. W. Norton & Company.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022). *World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment*. Geneva: UNCTAD.
- World Bank. (2022). *Global Economic Prospects: Darkening Skies*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Economic Forum. (2023). *Global Risks Report 2023*. Geneva: World Economic Forum.
- WTO (World Trade Organization). (2022). *World Trade Statistical Review 2022*. Geneva: WTO.

Bab 2

Dinamika Ekonomi Global Saat Ini

A. Pendahuluan

Ekonomi global pada era kontemporer mengalami dinamika yang sangat kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ketidakpastian geopolitik, disrupsi teknologi, serta krisis lingkungan menjadikan perekonomian dunia berada dalam kondisi yang penuh tantangan. Jika pada abad ke-20 pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh industrialisasi dan globalisasi perdagangan, maka pada abad ke-21 faktor-faktor seperti transformasi digital, perubahan iklim, pandemi, dan ketegangan geopolitik semakin dominan dalam membentuk arah kebijakan dan stabilitas ekonomi global.

Keterkaitan yang erat antara negara-negara menjadikan guncangan di satu kawasan dengan cepat menular ke kawasan lain. Oleh sebab itu, memahami dinamika ekonomi global saat ini sangat penting bagi pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha untuk menyiapkan strategi adaptif di masa depan.

B. Pertumbuhan Ekonomi Global

Dalam dua dekade terakhir, perekonomian dunia menunjukkan pola yang fluktuatif. Menurut laporan IMF (2023) dan World Bank (2022), beberapa fase utama yang memengaruhi pertumbuhan global antara lain:

1. Krisis Keuangan Global 2008 - yang berawal dari sektor perumahan Amerika Serikat, memicu resesi di Eropa dan melemahkan perdagangan dunia.
2. Periode Pemulihan (2010-2019) - ekonomi dunia mengalami pertumbuhan stabil, meski dengan ketidakpastian dari perang dagang AS-Tiongkok.
3. Pandemi Covid-19 (2020-2022) - menyebabkan kontraksi global terbesar sejak Depresi Besar 1930-an, dengan penurunan tajam aktivitas perdagangan dan produksi.
4. Pemulihan Pascapandemi - tahun 2021-2022 ditandai pertumbuhan kembali positif, tetapi tidak merata antara negara maju dan negara berkembang.
5. Inflasi Global dan Krisis Energi (2022-sekarang) - dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang menyebabkan lonjakan harga energi, pangan, dan inflasi global.

Saat ini, motor utama pertumbuhan global banyak digerakkan oleh Asia, khususnya Tiongkok, India, dan ASEAN. Sebaliknya, kawasan Eropa dan Amerika menghadapi tekanan inflasi serta ancaman stagnasi ekonomi.

C. Perdagangan Internasional dan Rantai Pasok Global

Perdagangan internasional masih menjadi tulang punggung ekonomi global, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan besar:

1. Gangguan rantai pasok akibat pandemi, yang menimbulkan kelangkaan barang dan biaya logistik tinggi.
2. Ketegangan geopolitik, seperti perang dagang AS-Tiongkok, yang memicu pergeseran strategi produksi dan perdagangan.
3. Diversifikasi rantai pasok, di mana banyak perusahaan multinasional mengalihkan sebagian produksi ke Asia Tenggara untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara.

Tren terbaru menunjukkan pergeseran dari global supply chain menuju regional supply chain, dengan kawasan Asia-Pasifik menjadi salah satu pusat produksi dunia.

D. Pasar Keuangan Global

Pasar keuangan dunia saat ini ditandai dengan volatilitas tinggi. Kebijakan moneter negara-negara maju, terutama kenaikan suku bunga The Fed, memengaruhi arus modal global. Hal ini berdampak pada:

1. Fluktuasi nilai tukar, terutama di negara berkembang yang bergantung pada dolar AS.
2. Ketidakpastian investasi, akibat tingginya inflasi global.
3. Pertumbuhan aset digital, seperti cryptocurrency, yang menawarkan peluang tetapi juga meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan.

Integrasi pasar keuangan menjadikan guncangan di satu kawasan dengan cepat menyebar ke kawasan lain, sebagaimana terlihat pada krisis keuangan 2008.

E. Transformasi Digital dan Ekonomi Baru

Transformasi digital menjadi motor penggerak utama ekonomi global. Beberapa bentuk utamanya adalah:

1. Ekonomi digital: meningkatnya perdagangan elektronik lintas negara, fintech, dan pembayaran digital.
2. Ekonomi berbasis inovasi: pemanfaatan AI, big data, IoT, dan robotika dalam produksi dan distribusi.
3. Platform global: perusahaan seperti Amazon, Google, Alibaba, dan Grab mengubah lanskap perdagangan internasional.

Transformasi digital mendorong efisiensi dan peluang baru, tetapi juga menciptakan tantangan berupa kesenjangan digital, keamanan siber, dan dominasi monopoli teknologi oleh perusahaan raksasa global.

F. Ketidaksetaraan Ekonomi Global

Meskipun globalisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat, distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut sangat timpang. Sebagian kecil populasi dunia memperoleh keuntungan luar biasa, sementara sebagian besar lainnya hanya menikmati pertumbuhan dalam skala terbatas.

Laporan Oxfam International (2023) menunjukkan bahwa 1% populasi terkaya dunia menguasai hampir 50% kekayaan global, sementara 50% populasi termiskin hanya menguasai kurang dari 2% kekayaan dunia. Kondisi ini mempertegas adanya wealth inequality yang semakin melebar dari waktu ke waktu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di antara individu, tetapi juga antarnegara.

1. Ketidaksetaraan Antarindividu

Di tingkat individu, kesenjangan kekayaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Akses yang berbeda terhadap pendidikan: Individu di negara maju cenderung memiliki akses lebih luas pada pendidikan berkualitas yang berimplikasi pada kesempatan kerja dan pendapatan.
- b. Akses terhadap teknologi: Kelas menengah atas lebih mudah memanfaatkan teknologi digital, investasi global, dan peluang ekonomi baru.
- c. Kebijakan perpajakan yang tidak adil: Banyak negara memiliki sistem pajak yang justru lebih menguntungkan kelompok kaya melalui celah hukum dan tax haven.

2. Ketidaksetaraan Antarnegara

Kesenjangan juga terlihat jelas antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju menguasai teknologi modern, sumber daya keuangan, dan pangsa pasar global, sementara negara berkembang masih bergantung pada ekspor komoditas mentah. Beberapa bentuk ketidaksetaraan antarnegara adalah:

- a. Ketimpangan teknologi: Negara maju mendominasi paten, riset, dan penguasaan teknologi tinggi.
 - b. Ketimpangan modal internasional: Negara berkembang menghadapi kesulitan mengakses investasi jangka panjang, bahkan terjebak dalam ketergantungan utang luar negeri.
 - c. Ketimpangan perdagangan: Perdagangan global masih banyak diwarnai praktik proteksionisme terselubung dari negara maju, misalnya dalam bentuk subsidi pertanian dan hambatan non-tarif.
3. Dampak Sosial dan Politik
- Kesenjangan ekonomi global tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik. Beberapa dampak yang menonjol antara lain:
- a. Meningkatnya populisme: Di banyak negara, ketidakpuasan masyarakat terhadap globalisasi memunculkan gerakan politik populis yang menentang keterbukaan pasar.
 - b. Munculnya proteksionisme: Negara-negara mulai melindungi industrinya dengan tarif, kuota, dan regulasi ketat sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan global.
 - c. Konflik sosial: Ketidaksetaraan pendapatan berpotensi memicu ketegangan sosial, protes massa, hingga instabilitas politik.
4. Upaya Mengatasi Ketidaksetaraan
- Berbagai lembaga internasional, seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF, menekankan pentingnya strategi pembangunan inklusif. Beberapa langkah yang direkomendasikan adalah:
- a. Reformasi sistem perpajakan global untuk menekan praktik tax avoidance oleh korporasi multinasional.
 - b. Peningkatan akses negara berkembang terhadap teknologi melalui kerja sama internasional.
 - c. Investasi pada pendidikan dan kesehatan untuk memperkuat modal manusia.

- d. Penerapan kebijakan perdagangan yang adil (fair trade) untuk memberi peluang yang lebih seimbang bagi negara berkembang.

G. Isu Lingkungan dan Ekonomi Hijau

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Ekonomi hijau (green economy) kini menjadi agenda penting dalam kebijakan global. Langkah-langkah yang ditempuh berbagai negara antara lain:

1. Transisi menuju energi terbarukan (solar, angin, hidro, dan bioenergi).
2. Penerapan carbon tax dan sistem perdagangan karbon.
3. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk mencapai net zero emission.

Negara yang berhasil mengintegrasikan keberlanjutan dalam sistem ekonominya berpotensi memiliki daya saing yang lebih kuat di masa depan.

H. Geopolitik dan Fragmentasi Global

Geopolitik memiliki pengaruh besar terhadap dinamika ekonomi saat ini. Beberapa peristiwa utama adalah:

1. Perang dagang AS-Tiongkok yang memengaruhi rantai pasok global.
2. Invasi Rusia ke Ukraina yang memicu krisis energi dan pangan.
3. Meningkatnya proteksionisme, yang melemahkan kerja sama multilateral.
4. Persaingan teknologi antara Barat dan Asia, terutama dalam bidang AI dan 5G.

Dunia kini bergerak menuju fragmentasi ekonomi global, di mana blok-blok regional (AS, Uni Eropa, Tiongkok, Rusia,

ASEAN) saling bersaing dalam memperebutkan dominasi ekonomi dan politik.

I. Kesimpulan

Dinamika ekonomi global saat ini ditandai oleh pertumbuhan yang tidak stabil, ketidakpastian perdagangan, volatilitas pasar keuangan, transformasi digital, serta isu-isu strategis seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan geopolitik.

Memahami kompleksitas ini menjadi kunci bagi pemerintah dan pelaku ekonomi dalam merumuskan strategi pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Dinamika ini juga mengisyaratkan bahwa masa depan ekonomi global akan ditentukan oleh kemampuan negara-negara dalam mengelola risiko sekaligus memanfaatkan peluang dari perubahan yang terjadi.

Referensi

- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Friedman, T. L. (2005). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- International Energy Agency (IEA). (2021). *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*. Paris: OECD/IEA.
- International Monetary Fund (IMF). (2022). *World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis*. Washington, D.C.: IMF.
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Oxfam International. (2023). *Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-Rich Now to Fight Inequality*. Oxford: Oxfam GB.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2022). *World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment*. Geneva: UNCTAD.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives - Shaping Our Future in a Transforming World*. New York: UNDP.
- World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. Washington, D.C.: World Bank Publications.

World Economic Forum (WEF). (2023). Global Risks Report 2023. Geneva: WEF.

World Trade Organization (WTO). (2022). World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade. Geneva: WTO.

Bab 3

Isu Utama dalam Perekonomian Global

(Yulianita Rahayu)

A. Ketimpangan Ekonomi Global: Antara Negara Maju dan Berkembang

Dampak globalisasi terkini telah diamati di banyak negara, yang mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tingkat globalisasi dan dampaknya bervariasi di antara negara dan kawasan dengan berbagai tingkat pembangunan. Proses pembangunan ekonomi telah mengalami dampak positif sebagai akibat dari meningkatnya globalisasi, tetapi dengan mengorbankan ketimpangan pendapatan antarnegara.

Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan ekonomi akibat globalisasi antara lain yaitu:

1. Perdagangan Bebas yang Tidak Setara. Dimana terdapat persaingan yang tidak seimbang antara produk lokal dengan produk impor dari negara maju seringkali menguntungkan perusahaan multinasional. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri dalam negeri dan memperlebar jurang antara kaya dan miskin.
2. Aliran Modal Asing yang Tidak Merata. Investasi asing langsung (*FDI-Foreign Direct Investment*) seringkali terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dan wilayah tertentu di negara berkembang, tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.
3. Teknologi dan Otomatisasi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat menciptakan lapangan kerja baru, namun

juga dapat mengancam lapangan kerja yang sudah ada, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah.

4. Kelemahan Institusi. Korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan kurangnya perlindungan sosial dapat memperparah dampak negatif globalisasi.
5. Liberalisasi Pasar Keuangan. Keterbukaan pasar keuangan dapat meningkatkan kerentanan negara berkembang terhadap krisis keuangan global dan fluktuasi nilai tukar.

Berikut adalah analisis mengenai bagaimana globalisasi mempengaruhi ketidaksetaraan ekonomi, yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata. Globalisasi sering kali mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak semua individu atau kelompok menikmati manfaatnya. Sektor-sektor tertentu, seperti teknologi informasi dan manufaktur, berkembang pesat, sedangkan sektor lain, seperti pertanian tradisional, sering kali tertinggal. Kesenjangan ini menciptakan dua kelompok masyarakat, mereka yang beruntung mendapatkan akses ke peluang baru dan mereka yang terpinggirkan.
2. Akses terhadap Pendidikan dan Keterampilan. Salah satu dampak signifikan dari globalisasi adalah peningkatan permintaan akan tenaga kerja terampil. Namun, di banyak negara berkembang, akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas masih sangat terbatas. Akibatnya, hanya segelintir individu yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja global, sementara banyak yang tetap terjebak dalam pekerjaan dengan keterampilan rendah dan upah yang minim.
3. Investasi Asing dan Konsentrasi Kekayaan. Investasi asing langsung (FDI) sering kali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi cenderung terfokus di daerah-daerah tertentu, terutama di kota-kota besar. Hal ini memperlebar kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sementara beberapa daerah berkembang dengan pesat berkat investasi, daerah lain tetap stagnan,

mengakibatkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.

4. Perubahan Struktur Ekonomi. Globalisasi mendorong perubahan dalam struktur ekonomi, dengan banyak negara beralih dari ekonomi agraris menuju ekonomi berbasis industri dan jasa. Proses ini sering kali tidak diimbangi dengan dukungan bagi pekerja yang terpinggirkan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan di sektor tradisional tanpa akses yang memadai untuk beralih ke sektor baru yang lebih menguntungkan.
5. Dampak Sosial. Ketidaksetaraan ekonomi yang meningkat dapat menyebabkan dampak sosial yang serius. Ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan yang tidak adil dapat memicu ketegangan sosial, protes, dan bahkan konflik. Ketika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem ekonomi dapat menurun.

Globalisasi adalah konsep multifaset yang melibatkan berbagai mekanisme, termasuk liberalisasi keuangan dan perdagangan. Dalam fase globalisasi, terdapat keragaman yang signifikan di berbagai negara, kawasan, budaya, dan kelas keterampilan dari waktu ke waktu.

Pengurangan ketimpangan sangat penting, tidak hanya untuk mencapai kesetaraan finansial, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup bangsa-bangsa. Di negara-negara berkembang, masalah ketimpangan menimbulkan hambatan substansial, karena memperparah perbedaan dalam berbagai aspek seperti distribusi pendapatan, aksesibilitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, dan kemungkinan untuk kemajuan. Kehadiran perbedaan sosial ekonomi ini tidak hanya menjadi hambatan bagi kemajuan individu tetapi juga menimbulkan ancaman bagi seluruh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Keharusan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan

penerapan kebijakan inklusif dan program sosial sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan.

B. Krisis Kesehatan Global dan Stabilitas Ekonomi

Jika kembali ke sejarah awal mula adanya virus, atau wabah - wabah yang telah menyerang di dunia, Wabah Covid-19 memang bukan pandemik pertama yang di hadapi oleh dunia Internasional. Tetapi krisis yang terjadi secara global yang diakibatkan dari wabah Covid- 19 lebih parah jika di bandingkan wabah-wabah yang menyerang dunia sebelumnya, seperti, MERS, SARS, dan flu burung. Salah satu contoh wabah yang pernah menyerang masyarakat Eropa adalah Wabah Bubonic dimana penyebarannya yang sangat cepat. Periode pertama terjadi pada masa perang Peloponnesia yang terjadi pada tahun 430 SM, yang akhirnya disebut Pandemi Peloponnesia. Penyakit ini menewaskan sekitar hamper 25 % populasi di Athena. Pandemi ini berdampak serius, bahkan menurunkan kepatuhan terhadap aturan dan keyakinan religious dari masyarakat Athena (Tanjung, 2021) .

Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) telah menimbulkan krisis yang signifikan di berbagai sektor, termasuk Kesehatan, bisnis, sosial, ekonomi, politik, hubungan internasional dan pendidikan.

Di awal tahun 2020 sebelum pandemi terjadi, berbagai pihak masih melihat bahwa tahun 2020 merupakan tahun pemulihan ekonomi global. *International Monetary Fund* (IMF) bahkan memperkirakan Dunia akan tumbuh 3,3%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi global pada 2019 yang mencapai 2,9%. Meski sebetulnya masih sangat rentan dipengaruhi berbagai dinamika ekonomi seperti produktivitas yang turun, proteksionisme dan perang dagang, tapi tidak ada yang menduga badai ekonomi akan datang dan terjadi akibat isu kesehatan. Covid-19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah

perekonomian global yang semula optimis membaik, menuju resesi. Penularan yang sangat cepat dan menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang *unprecedented* menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dihindari seperti *lockdown*, *physical distancing*, *travel ban/restriction*, dan lainnya menimbulkan konsekuensi turunnya aktivitas ekonomi secara signifikan, yang tentunya menghasilkan implikasi yang sangat besar.

COVID-19 yang menyebar cepat itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi. Perkembangan globalisasi sendiri sudah terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19 menyerang dunia. Hal itu menjadi diskursus menarik yang menuai perdebatan pro dan kontra terhadap nasib globalisasi itu sendiri, melihat bahwa dunia saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju pada tatanan kehidupan dunia baru akibat adanya perubahan-perubahan yang semakin kompleks.

Di samping itu, fenomena globalisasi ini mengakibatkan pandemi COVID-19 dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga mengejutkan banyak negara. Salah satunya dapat dilihat dalam bidang ekonomi suatu negara yang menurun sangat drastis dan membuat dunia seolah-olah mulai melemah.

Negara-negara yang bergantung pada pariwisata, perjalanan, perhotelan, dan hiburan untuk pertumbuhan ekonominya mengalami gangguan yang sangat besar. Pasar negara berkembang dan ekonomi negara berkembang menghadapi tantangan tambahan dengan pembalikan arus modal yang belum pernah terjadi sebelumnya karena selera risiko global menurun, dan tekanan mata uang, sementara menghadapi sistem kesehatan yang lebih lemah, dan ruang

fiskal yang lebih terbatas untuk memberikan dukungan. Selain itu, beberapa negara memasuki krisis ini dalam kondisi yang rentan dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat utang yang tinggi.

Kerja sama multilateral sangat penting bagi pemulihan ekonomi global. Untuk mendukung pengeluaran yang dibutuhkan di negara-negara berkembang, kreditor bilateral dan lembaga keuangan internasional harus menyediakan pembiayaan lunak, hibah, dan keringanan utang. Aktivasi dan pembentukan jalur pertukaran antara bank-bank sentral utama telah membantu meredakan kekurangan likuiditas internasional, dan mungkin perlu diperluas ke lebih banyak negara. Upaya kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa dunia tidak mengalami de-globalisasi, sehingga pemulihan tidak terganggu oleh kerugian lebih lanjut terhadap produktivitas (Gopinath, 2020).

Ada tiga aspek utama dalam kerja sama global di bidang ekonomi yang relevan dengan konteks pandemi, yaitu (Saputro, 2020) :

1. **Dukungan keuangan.** Pandemi COVID-19 menambah tekanan pada anggaran nasional di banyak negara, termasuk Indonesia, yang harus mengatasi defisit anggaran yang melebar melebihi batas defisit tiga persen. Penurunan pendapatan negara akibat berkurangnya aktivitas ekonomi juga memerlukan dukungan finansial dari bantuan bilateral, meskipun bantuan utang luar negeri memiliki risiko yang harus dikelola dengan hati-hati.
2. **Bantuan teknis.** Penanganan pemulihan ekonomi memerlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik domestik maupun internasional. Indonesia perlu memanfaatkan pengalaman negara lain dalam program pemulihan untuk merancang kebijakan yang efektif. Berbagi informasi dan pengalaman dengan

negara lain dapat membantu Indonesia mengembangkan strategi pemulihan ekonomi yang tepat.

3. **Diplomasi ekonomi.** Selama pemulihan ekonomi, penting untuk mempromosikan kepentingan ekonomi Indonesia kepada mitra internasional, terutama dalam bidang keuangan, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kesadaran global mengenai ketergantungan pada mitra dagang tertentu selama krisis, seperti gangguan rantai pasokan, menggarisbawahi pentingnya diversifikasi hubungan ekonomi. Misi diplomatik Indonesia memainkan peran penting dalam membangun citra positif internasional dan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai mitra dagang yang potensial.

Kemunculan Pandemi COVID-19 tentunya membuat perubahan yang cukup signifikan bagi globalisasi itu sendiri karena banyak kegiatan globalisasi yang harus membutuhkan beberapa penyesuaian seperti pergerakan manusia yang mulai dibatasi, pertemuan tatap muka diadakan secara virtual (online) dan lain-lain.

Oleh karena itu, globalisasi nantinya akan lebih dinamis dan dilihat sebagai persaingan yang saling membangun. Pandemi adalah sebuah portal menuju dunia baru, dengan demikian boleh dikatakan COVID-19 dapat menjadi portal menuju globalisasi baru yang lebih berkeadilan yang mensejahterahkan negara-negara berkembang dan negara-negara maju secara setara. Adapun diskursus tentang deglobalisasi (antitesis globalisasi), hampir tidak mungkin dapat dijalankan karena setiap negara pasti dan masih membutuhkan bantuan dari negara lain. Stabilisasi perekonomian global dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19 sangat memerlukan kerja sama lintas negara, bilateral dan multilateral. G20 sebagai salah satu contoh forum multilateralisme yang didalamnya terdapat negara-negara maju dan berkembang bekerja sama saling

memberikan informasi serta menstimulasi kondisi perekonomian.

C. Proteksionisme dan Perang Dagang

Di era globalisasi, era kemenangan ideologi kapitalisme, perang dengan menggunakan senjata militer telah menjadi salah satu instrumen kuno negara-negara dunia dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Konsepsi tentang perang dalam pandangan masyarakat telah mengalami perluasan makna yakni perang tidak lagi hanya dipahami dalam bentuk konflik yang melibatkan senjata militer tetapi juga dalam bentuk yang lain seperti perang dengan menggunakan instrumen-instrumen ekonomi bahkan budaya. Ini terdeskripsikan dalam istilah “War by Other Means” atau perang dengan menggunakan instrumen lain (selain militer) yang secara implisit menyatakan bahwa jika negara ingin berperang dengan negara lain, maka gunakanlah instrumen non-militer yakni instrumen ekonomi. Salah satu bentuk perang dengan menggunakan instrumen ekonomi adalah perang dagang. Perang yang identik dengan retaliasi atau tindakan balas membalas dalam bidang perdagangan ini, pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara besar untuk melindungi industri domestiknya dari kompetisi yang lebih berpihak pada industri asing (Arisanto and Wibawa, 2021).

Dalam rentang tahun 2018-2020, atensi politik internasional tertuju pada perang dagang yang dilakukan oleh dua negara superpower yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Perang dagang merupakan istilah yang digunakan oleh media dan diulang-ulang oleh para politisi dan ekonom untuk tindakan Amerika Serikat (AS) yang telah menaikkan bea masuk impor terhadap produk manufaktur China dan beberapa negara lainnya dan mendapat reaksi balasan dari negara yang dituju.

Perang dagang ini berlangsung secara berhadapan-hadapan (head to head) sehingga sulit diharapkan dapat diselesaikan

secara bilateral dalam waktu dekat, namun dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat dunia. Dampak tersebut antara lain nilai tukar mata uang sejumlah negara mulai tertekan, demikian pula dengan nilai saham. Kondisi perekonomian dunia akan terdampak oleh perang dagang yang pada akhirnya akan memengaruhi perekonomian domestik negaranegara di dunia. Perang dagang antara AS dan China telah membahayakan masa depan pertumbuhan ekonomi dan investasi negara-negara di dunia.

Dampak lain dari perang dagang adalah munculnya semangat proteksionisme dan unilateralisme di atas multilateralisme. Negaranegara besar dengan mudah akan menjatuhkan sanksi apabila kondisi perdagangan telah merugikan dan mengancam identitas mereka sebagai negara besar.

Proteksionisme merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu produsen dalam negeri agar mampu melawan produsen asing di industri tertentu, yang dapat dilakukan dengan menaikkan harga produk luar negeri, menurunkan biaya bagi produsen dalam negeri, dan membatasi akses produsen asing masuk ke pasar domestik. Ada beberapa alasan bagi suatu negara untuk perlu melakukan proteksionisme dalam perdagangan luar negerinya antara lain :

1. Pertahanan nasional (*national defence*),
2. Untuk meningkatkan perdagangan (*improvements in terms of trade*),
3. Perkembangan ekonomi (*economic developments*),
4. Peningkatan kekuatan tawar-menawar dalam perdagangan internasional (*enhancement of external bargaining power*),
5. Meningkatkan tenaga kerja, dan
6. Beberapa alasan yang muncul adalah sebagai upaya pencegahan adanya dumping.

Hal tersebut yang menjadikan argumen kuat bahwa proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara.

Berdasarkan data selama periode 2017-2020, investor asing dari Amerika Serikat dan China semakin tertarik pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara berkembang dikenal memiliki risiko kerugian yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju yang terlibat dalam perang dagang. Dalam kaitannya dengan perang dagang Amerika Serikat dan China, hasil perbandingan bahwa negara berkembang kerugiannya lebih rendah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Negara berkembang tidak terlibat langsung dalam konflik. Pihak utama dalam perang dagang adalah negara-negara maju. Negara berkembang terdampak secara tidak langsung. Negara berkembang tidak terkena langsung dampak pengenaan tarif dan sanksi dagang, sehingga eksposur terhadap kerugian langsung lebih kecil.
2. Negara berkembang lebih fleksibel dalam mencari pasar alternatif. Negara berkembang dapat mengalihkan ekspor produknya ke negara lain yang sedang mencari substitusi produk akibat perang dagang. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat dan China saling membatasi impor, maka negara berkembang dapat mengisi kekosongan rantai pasok global tersebut.
3. Banyak negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dibandingkan negara maju. Hal ini membuat negara berkembang lebih diminati sebagai tempat investasi jangka menengah dan jangka panjang. Potensi keuntungan dari investasi ini lebih tinggi sekalipun ada risiko politik atau struktural.
4. Beberapa negara berkembang (seperti Indonesia, India, Vietnam) memiliki populasi penduduk yang banyak dengan konsumsi domestik yang terus meningkat. Kondisi ini menjadi peluang besar yang stabil bagi investor, meskipun perdagangan internasional sedang terguncang.

5. Negara berkembang seringkali menjalankan politik luar negeri yang netral atau bebas aktif. Posisi netral dalam politik global ini tidak menjadi sasaran retaliasi politik ekonomi. Hal ini membuat iklim bisnis negara berkembang lebih aman secara geopolitik selama krisis perang dagang.

Oleh karena negara berkembang tidak menjadi pusat konflik, maka memiliki pasar alternatif, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih menjanjikan. Negara berkembang lebih tangguh menghadapi dampak perang dagang global. Alasan inilah yang menyebabkan investor Asing, seperti dari Amerika Serikat dan China justru semakin berminat investasi di negara berkembang sebagai tempat yang aman untuk menanamkan modalnya. Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi investor asing karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Perang dagang yang melibatkan AS versus China ini tidak terlepas dari kebangkitan ekonomi China sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi global yang mampu menyaingi kekuatan ekonomi AS. Harus dicatat bahwa China adalah bagian dari Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS), rezim ekonomi baru penantang rezim ekonomi global yang bercorak kapitalis yang kini dipimpin oleh Amerika Serikat (Sahide, 2021).

Referensi

- Arisanto, P.T. and Wibawa, A. (2021) "Perang Dagang Era Donald Trump Sebagai Kebijakan Luar Negeri Adaptif Convulsive Amerika Serikat", *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), pp. 163-183. Available at: <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.222>.
- Gopinath, G. (2020) "*The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression*". Available at: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression> (Accessed: 30 May 2025).
- Hidayat, C. (2024) "Menavigasi Krisis COVID-19 dan Resesi Ekonomi: Diplomasi Manajemen Pertahanan Indonesia", *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), pp. 254-264. Available at: <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.38688>.
- "*Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020*" (2022). Available at: <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal> (Accessed: 30 May 2025).
- Putri, N.L.P.D.S. *et al.* (2024) "Dampak Globalisasi terhadap Ketidaksetaraan Ekonomi di Negara Berkembang".
- Rastuti, T. and Khoirudin, A.A.D. (2025) "Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme", 26(1), pp. 26-66.
- Sahide, A. (2021) "Proteksionisme Trump dan Supremasi Politik Global Amerika", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(1), pp. 1-16. Available at: <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3570.1-16>.
- Saputro, E.N.. (2020) "*Bagaimana kerja sama antarnegara bisa membantu Indonesia dalam memulihkan ekonomi saat pandemi*". Available at: <https://theconversation.com/bagaimana-kerja-sama-antarnegara-bisa-membantu-indonesia-dalam->

- memulihkan-ekonomi-saat-pandemi-145025 (Accessed: 30 May 2025).
- Setianingtiyas, F.A., Wijayati, H. and Haqqi, H. (2021) "Proteksionisme AS terhadap Komoditas Aluminium dan Baja Indonesia Pada Masa Perang Dagang AS-China", *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1), pp. 21-44. Available at: <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.5297>.
- Simatupang, K.H., Motoh, B.N.E. and Kelung, T.P. (2022) "Analisis Nasib Globalisasi Pasca Pandemi COVID-19", *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 14(27), p. 30. Available at: <https://doi.org/10.19166/verity.v14i27.5903>.
- Tabash, M.I. et al. (2024) "Globalization and Income Inequality in Developing Economies: A Comprehensive Analysis", *Economies*, 12(1), pp. 1-16. Available at: <https://doi.org/10.3390/economies12010023>.
- Tanjung, S.I. (2021) "Dampak Covid - 19 Dalam Stabilitas Ekonomi Politik Internasional", *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), pp. 654-671. Available at: <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1387>.
- Wangke, H. (2019) "Asean, Indonesia, dan Perang Dagang Amerika Serikat-China", *Info Singkat Bidang Hubungan Internasional*, XI(11), pp. 7-12. Available at: [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-XI-11-I-P3DI-Juni-2019-170.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-11-I-P3DI-Juni-2019-170.pdf).

Biodata Penulis



Yulianita Rahayu. Penulis yang mempunyai hobi di bidang kuliner dan renang ini, tertarik dengan fenomena-fenomena ekonomi yang selalu *unpredictable* dan *uncertainty*. Sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mempelajarinya. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk kuliah jenjang S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNISBA (Universitas Islam Bandung) pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan studi S2 Master of Business Administration di School of Business and Management ITB. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Bandung.

Bab 4

Peran Institusi Keuangan International

Institusi keuangan internasional (IKI) memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian global. Lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berfungsi sebagai pengawas, fasilitator, dan penyedia bantuan keuangan bagi negara-negara yang menghadapi krisis maupun yang sedang membangun infrastruktur ekonomi.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan integrasi pasar, arus modal lintas negara, dan ketergantungan antarnegara, peran institusi keuangan internasional menjadi semakin vital.

A. Dana Moneter Internasional (IMF)

IMF didirikan pada tahun 1944 melalui Bretton Woods Agreement dengan tujuan utama menjaga stabilitas sistem moneter internasional. Fungsi utama IMF antara lain:

1. Stabilisasi nilai tukar dan moneter global

IMF membantu negara-negara anggota dalam menjaga kestabilan mata uang serta mencegah krisis neraca pembayaran.

2. Pinjaman darurat

IMF menyediakan dana pinjaman jangka pendek bagi negara yang mengalami kesulitan likuiditas atau krisis keuangan, seperti yang terjadi pada krisis Asia 1997-1998.

3. Pengawasan kebijakan ekonomi

IMF melakukan pengawasan melalui *surveillance mechanism* untuk menilai kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan suatu negara agar sesuai dengan prinsip stabilitas global.

Meskipun demikian, IMF kerap menuai kritik karena syarat pinjaman yang dianggap terlalu ketat dan dapat memperburuk kondisi sosial negara peminjam, terutama dalam hal pengurangan subsidi dan liberalisasi ekonomi.

B. Bank Dunia

Bank Dunia atau World Bank berfokus pada pembangunan jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Lembaga ini memberikan pinjaman berbunga rendah, hibah, dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang. Program yang dibiayai mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta reformasi kelembagaan.

Peran utama Bank Dunia:

1. Meningkatkan akses negara berkembang terhadap modal internasional.
2. Membiayai proyek pembangunan berkelanjutan.
3. Menyediakan riset dan analisis kebijakan.

Namun, Bank Dunia juga dikritik karena beberapa proyeknya dianggap kurang memperhatikan aspek lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

C. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

WTO dibentuk pada 1995 sebagai pengganti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Tujuannya adalah menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih terbuka, adil, dan dapat diprediksi.

Fungsi utama WTO:

1. Menurunkan hambatan tarif dan nontarif dalam perdagangan global.
2. Menyelesaikan sengketa dagang antarnegara melalui mekanisme hukum yang disepakati.
3. Mendorong transparansi kebijakan perdagangan.

Walaupun berperan penting dalam mendorong integrasi perdagangan, WTO menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya proteksionisme dan kebuntuan negosiasi perdagangan multilateral (Doha Round).

D. Bank Sentral Global dan G20

Selain lembaga formal seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan World Trade Organization (WTO), terdapat pula institusi dan forum internasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global. Salah satu di antaranya adalah Kelompok Dua Puluh (G20), yang dianggap sebagai forum koordinasi kebijakan ekonomi terbesar di dunia.

1. Peran G20 dalam Ekonomi Global

G20 terdiri atas 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia ditambah Uni Eropa. Anggotanya mewakili sekitar 85% Produk Domestik Bruto (PDB) global, lebih dari 75% perdagangan internasional, serta dua pertiga populasi dunia. Dengan basis representasi yang luas tersebut, G20 menjadi forum penting untuk membahas isu-isu ekonomi global, mulai dari stabilitas keuangan, perdagangan internasional, perubahan iklim, hingga pembangunan berkelanjutan.

Salah satu momen penting yang memperlihatkan peran strategis G20 adalah ketika forum ini mengambil langkah-langkah terkoordinasi dalam menghadapi krisis keuangan global 2008. Negara-negara anggota sepakat untuk memberikan stimulus fiskal, meningkatkan pengawasan terhadap sistem keuangan, serta memperkuat regulasi

perbankan internasional. Kesepakatan tersebut dinilai berhasil mencegah keruntuhan sistem keuangan dunia secara lebih parah.

2. Peran Bank Sentral Global

Selain G20, bank-bank sentral utama dunia juga memiliki peran besar dalam memengaruhi dinamika ekonomi global. Beberapa bank sentral yang memiliki pengaruh paling signifikan antara lain:

a. Federal Reserve (The Fed) - Amerika Serikat

Sebagai bank sentral negara dengan ekonomi terbesar di dunia, kebijakan moneter The Fed, terutama terkait suku bunga acuan (Federal Funds Rate), berdampak luas terhadap arus modal global, nilai tukar mata uang, hingga harga komoditas. Keputusan The Fed menaikkan suku bunga biasanya memicu arus modal keluar dari negara berkembang menuju aset-aset aman di Amerika Serikat, sehingga meningkatkan risiko krisis likuiditas di negara-negara emerging markets.

b. European Central Bank (ECB) - Uni Eropa

ECB mengatur kebijakan moneter bagi negara-negara yang tergabung dalam zona euro. Kebijakan ECB, seperti Quantitative Easing (QE) atau pengaturan suku bunga, tidak hanya memengaruhi perekonomian Eropa, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pasar keuangan global.

c. Bank of Japan (BoJ) dan People's Bank of China (PBoC)

BoJ dikenal dengan kebijakan moneter ultra-longgar, termasuk suku bunga negatif dan intervensi di pasar obligasi. Sementara itu, PBoC memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas mata uang yuan, mengingat Tiongkok kini merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia sekaligus mitra dagang utama bagi banyak negara.

3. Koordinasi dan Tantangan

Meskipun bank sentral beroperasi dengan mandat nasional, dampak kebijakan mereka kerap bersifat lintas batas. Oleh karena itu, forum seperti G20 sering digunakan sebagai wadah koordinasi antarbank sentral dan menteri keuangan untuk mencegah krisis sistemik. Misalnya, saat pandemi COVID-19, G20 berperan dalam mendorong stimulus fiskal global dan koordinasi kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Namun, koordinasi ini tidak selalu berjalan mulus. Setiap negara memiliki prioritas domestik yang berbeda, sehingga terkadang keputusan bank sentral menimbulkan ketidakseimbangan global. Misalnya, kebijakan suku bunga tinggi The Fed dapat memperkuat dolar AS secara signifikan, yang pada gilirannya menekan nilai tukar negara berkembang dan meningkatkan beban utang luar negeri mereka.

E. Kritik dan Tantangan

Meskipun berkontribusi pada stabilitas global, institusi keuangan internasional menghadapi sejumlah kritik:

1. Ketidaksetaraan representasi - Negara maju memiliki suara lebih besar dibandingkan negara berkembang dalam pengambilan keputusan.
2. Ketergantungan negara berkembang - Bantuan seringkali menimbulkan ketergantungan utang.
3. Kurangnya perhatian terhadap isu sosial dan lingkungan - Proyek pembangunan kadang mengabaikan dampak ekologis dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tantangan ke depan adalah bagaimana lembaga-lembaga ini dapat melakukan reformasi agar lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap perubahan dinamika global.

F. Penutup

Institusi keuangan internasional berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian global. Melalui peran IMF, Bank Dunia, WTO, G20, serta bank sentral global, stabilitas dan integrasi ekonomi dunia dapat lebih terjaga. Namun, reformasi mendalam diperlukan agar institusi-institusi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan dan keberlanjutan pembangunan global.

Referensi

- Bank for International Settlements (BIS). (2022). Annual Economic Report 2022. Basel: BIS.
- Blinder, A. S. (2013). After the Music Stopped: The Financial Crisis, the Response, and the Work Ahead. New York: Penguin Press.
- Eichengreen, B. (2019). Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. Princeton: Princeton University Press.
- Federal Reserve. (2023). Monetary Policy Report. Washington, D.C.: Board of Governors of the Federal Reserve System.
- G20. (2009). Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit. Retrieved from <https://www.g20.org>
- International Monetary Fund (IMF). (2020). The IMF and the Global Financial Crisis: Role and Reforms. Washington, D.C.: IMF.
- Obstfeld, M., & Taylor, A. M. (2017). International Monetary Relations: Taking Finance Seriously. *Journal of Economic Perspectives*, 31(3), 3-28.
- Roubini, N., & Mihm, S. (2010). Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. New York: Penguin Books.
- Schnabel, I. (2022). Monetary Policy and Global Financial Stability. Speech at the European Central Bank (ECB). Frankfurt: ECB.
- World Bank. (2021). Global Economic Prospects: Recovery Amid Divergent Growth Prospects. Washington, D.C.: The World Bank.

Bab 5

Ekonomi Digital dan Revolusi Industri 4.0

(Masyhuri)

A. Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 merupakan salah satu fase transformasi terbesar dalam sejarah peradaban manusia yang mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan politik global secara fundamental. Jika Revolusi Industri pertama ditandai dengan mekanisasi melalui mesin uap, Revolusi Industri kedua dengan pemanfaatan listrik dan produksi massal, serta Revolusi Industri ketiga dengan komputerisasi dan otomatisasi berbasis teknologi informasi, maka Revolusi Industri 4.0 menghadirkan integrasi mendalam antara dunia fisik, digital, dan biologis.

Era ini ditandai oleh perkembangan teknologi mutakhir seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), big data analytics, cloud computing, robotika, blockchain, hingga teknologi bioteknologi dan nanoteknologi. Kehadiran teknologi-teknologi tersebut menciptakan ekosistem baru di mana informasi menjadi aset utama, data menjadi “minyak baru” (the new oil), dan konektivitas digital menjadi fondasi dari aktivitas ekonomi modern.

Transformasi tersebut kemudian melahirkan konsep ekonomi digital, yaitu suatu sistem perekonomian yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam sistem ini, proses transaksi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga pelayanan publik

sangat dipengaruhi oleh inovasi digital. Ekonomi digital bukan sekadar mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga mendefinisikan ulang model bisnis, pola kerja, hingga hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat.

Bagi negara-negara maju, Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital telah membuka peluang besar untuk memperkuat daya saing global, menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok global. Namun, bagi negara-negara berkembang, fenomena ini menghadirkan tantangan ganda. Di satu sisi, ekonomi digital dapat menjadi akselerator pembangunan dengan membuka akses pasar, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong inovasi kewirausahaan. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta ketimpangan akses internet dapat memperlebar jurang kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang.

Selain itu, Revolusi Industri 4.0 juga menghadirkan dampak multidimensi yang perlu dikelola secara bijak. Dari sisi positif, ekonomi digital menciptakan efisiensi produksi, mempercepat layanan publik, menghadirkan solusi bisnis baru, dan mendorong kolaborasi lintas batas negara. Namun, di sisi lain, muncul pula risiko seperti hilangnya lapangan kerja tradisional akibat otomatisasi, meningkatnya kerentanan keamanan siber, potensi monopoli digital oleh perusahaan teknologi raksasa, serta ancaman terhadap privasi data masyarakat.

Oleh karena itu, memahami dinamika ekonomi digital dalam konteks Revolusi Industri 4.0 menjadi hal yang sangat penting. Negara, pelaku bisnis, akademisi, hingga masyarakat sipil perlu membangun strategi adaptif dan kolaboratif agar dapat memanfaatkan peluang yang tersedia sekaligus mengurangi risiko yang ditimbulkan. Ekonomi digital bukan sekadar fenomena teknologi, melainkan sebuah

paradigma baru yang mendefinisikan ulang arah pembangunan ekonomi dunia di abad ke-21.

B. Konsep Ekonomi Digital

Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang didorong oleh teknologi digital. Menurut OECD (2020), ekonomi digital mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang menggunakan data digital, jaringan internet, dan kecerdasan buatan sebagai basisnya. Ciri utama ekonomi digital adalah:

1. Dematerialisasi - barang dan jasa beralih dari bentuk fisik ke digital, seperti buku elektronik, musik digital, dan layanan streaming.
2. Platformisasi - perusahaan berbasis platform (misalnya Gojek, Tokopedia, Grab, Shopee) menjadi tulang punggung transaksi ekonomi modern.
3. Data-driven economy - data menjadi aset berharga setara dengan minyak di era industri sebelumnya.
4. Kecepatan dan efisiensi - inovasi digital memangkas waktu, biaya, dan jarak dalam berbagai transaksi.

C. Karakteristik Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 membawa karakteristik unik yang membedakannya dari fase sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah:

1. Konektivitas tinggi (IoT): Perangkat dapat berkomunikasi secara otomatis melalui internet.
2. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI): Mesin mampu belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan.
3. Big Data dan Analitik: Data dalam jumlah besar digunakan untuk meramalkan tren pasar dan perilaku konsumen.
4. Automasi dan Robotika: Menggantikan pekerjaan manual, meningkatkan produktivitas, sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga kerja konvensional.
5. Blockchain: Memberikan keamanan dan transparansi dalam transaksi finansial serta rantai pasok global.

D. Dampak Ekonomi Digital terhadap Perekonomian Global

Ekonomi digital berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Menurut laporan World Bank (2022), sektor digital menyumbang rata-rata 15% dari PDB global, dengan angka yang lebih tinggi di negara maju. Dampak positif ekonomi digital antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi: transaksi menjadi lebih cepat dan murah.
2. Menciptakan peluang usaha baru: UMKM dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar.
3. Meningkatkan inklusi keuangan: layanan fintech dan mobile banking mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan.
4. Inovasi model bisnis: lahirnya gig economy (pekerjaan berbasis platform seperti driver online, freelancer, content creator).

Namun, terdapat juga dampak negatif:

1. Ketidaksetaraan digital (digital divide) - negara berkembang dan kelompok miskin sulit bersaing tanpa akses internet memadai.
2. Disrupsi tenaga kerja - pekerjaan manual tergantikan oleh otomatisasi.
3. Ketergantungan pada teknologi - risiko keamanan siber meningkat.
4. Dominasi korporasi global - raksasa teknologi (Google, Amazon, Meta, Alibaba) menguasai pasar digital dunia.

E. Ekonomi Digital di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain (2023), nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 82 miliar pada tahun 2025. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia:

1. Jumlah penduduk besar (lebih dari 270 juta jiwa).
2. Pengguna internet masif (sekitar 215 juta pengguna aktif).
3. Pertumbuhan e-commerce yang pesat, dengan platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.
4. Perkembangan fintech seperti OVO, DANA, dan Gopay yang meningkatkan inklusi keuangan.
5. Dukungan pemerintah melalui kebijakan "Making Indonesia 4.0".

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah:

1. Kesenjangan digital antarwilayah (urban-rural gap).
2. Literasi digital masyarakat yang masih rendah.
3. Regulasi perlindungan data yang belum optimal.
4. Ancaman keamanan siber.

F. Revolusi Industri 4.0 dan Masa Depan Pekerjaan

Revolusi Industri 4.0 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap struktur tenaga kerja di seluruh dunia. Perubahan ini ditandai oleh semakin pesatnya penerapan otomatisasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Internet of Things (IoT), robotika, hingga teknologi big data dalam berbagai sektor industri. Akibatnya, banyak pekerjaan yang bersifat rutin, manual, dan dapat diprediksi berpotensi tergantikan oleh mesin dan algoritma cerdas. Namun, perubahan ini tidak hanya mengurangi lapangan kerja, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam bentuk profesi berbasis teknologi, kreativitas, dan keahlian analitis yang tinggi. Dengan kata lain, Revolusi Industri 4.0 bukan hanya tentang hilangnya pekerjaan, tetapi juga tentang transformasi pekerjaan menuju model baru yang lebih adaptif dan berbasis pengetahuan.

Menurut laporan McKinsey Global Institute (2021), sekitar 800 juta pekerjaan di seluruh dunia berpotensi hilang akibat otomatisasi pada tahun 2030. Pekerjaan-pekerjaan yang paling rentan adalah pekerjaan dengan pola kerja yang repetitif dan mudah didigitalisasi, seperti operator mesin,

kasir, administrasi perkantoran, hingga sebagian pekerjaan di sektor manufaktur. Meski demikian, laporan yang sama juga menyebutkan bahwa akan tercipta sekitar 890 juta pekerjaan baru, terutama di bidang:

1. Teknologi digital (pengembang perangkat lunak, analis data, ahli AI, keamanan siber).
2. Energi terbarukan (teknisi panel surya, spesialis kendaraan listrik, ahli pengelolaan lingkungan).
3. Layanan kesehatan (tenaga medis, terapis kesehatan mental, analis bioteknologi).
4. Industri kreatif dan pendidikan digital (desainer multimedia, content creator, instruktur online).

Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada pergeseran besar dalam dunia kerja, jumlah total pekerjaan global diproyeksikan tetap tumbuh, hanya saja bentuk dan keterampilannya akan sangat berbeda dengan era sebelumnya. Dalam konteks ini, reskilling (pelatihan ulang untuk memperoleh keterampilan baru) dan upskilling (peningkatan keterampilan yang sudah dimiliki) menjadi kunci utama agar tenaga kerja mampu bertahan dan beradaptasi. Perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah dituntut untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang memungkinkan setiap individu terus mengembangkan kompetensinya.

Selain itu, munculnya fenomena gig economy dan remote working juga akan memperluas cakupan peluang kerja, di mana individu dapat bekerja secara fleksibel, lintas negara, dan berbasis proyek. Perubahan paradigma ini menuntut tenaga kerja tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, manajemen waktu, berpikir kritis, dan kreativitas. Dengan demikian, masa depan pekerjaan di era Revolusi Industri 4.0 bukanlah tentang berkurangnya

kesempatan kerja, melainkan tentang bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan transformasi tersebut. Negara yang mampu mempersiapkan sumber daya manusianya dengan baik melalui pendidikan, pelatihan, dan inovasi akan menjadi pemenang dalam era ekonomi digital global.

G. Tantangan dan Peluang Ekonomi Digital

Ekonomi digital menghadirkan dua sisi yang saling melengkapi: tantangan yang harus diantisipasi serta peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Perubahan teknologi yang begitu cepat memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan bekerja.

Tantangan Ekonomi Digital

1. Regulasi global yang belum seragam
Perbedaan regulasi antarnegara terkait perdagangan digital, perpajakan, dan perlindungan konsumen menyebabkan hambatan dalam membangun ekosistem global yang adil. Misalnya, isu mengenai pajak digital yang masih diperdebatkan di tingkat internasional.
2. Isu keamanan dan privasi data
Data menjadi “minyak baru” dalam era digital. Namun, semakin besar pemanfaatannya, semakin tinggi pula risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menuntut adanya sistem keamanan siber yang kuat serta regulasi perlindungan data yang jelas.
3. Konsentrasi kekuasaan pada raksasa teknologi global
Perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, Meta, dan Alibaba mendominasi pasar global. Konsentrasi ini berpotensi menciptakan ketergantungan negara berkembang terhadap platform asing, sehingga mengurangi kedaulatan digital.
4. Pengangguran akibat disrupsi teknologi
Otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) menggantikan sejumlah pekerjaan rutin. Jika tidak diimbangi dengan

reskilling tenaga kerja, maka kesenjangan sosial-ekonomi akan semakin melebar.

Peluang Ekonomi Digital

1. Peningkatan efisiensi bisnis

Teknologi digital memungkinkan proses bisnis berjalan lebih cepat, hemat biaya, dan minim kesalahan. Contohnya, penggunaan cloud computing, big data, dan AI dalam operasional perusahaan.

2. Akses pasar global tanpa batas

UMKM dapat menjangkau konsumen internasional melalui platform e-commerce dan digital marketing. Ini membuka peluang ekspor bagi produk lokal tanpa perlu infrastruktur fisik yang besar.

3. Pengembangan ekonomi kreatif dan start-up

Ekonomi digital mendorong lahirnya start-up inovatif dalam bidang fintech, edutech, healthtech, hingga agritech. Sektor ini menjadi motor penggerak lapangan kerja baru sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi.

4. Peningkatan produktivitas nasional

Dengan pemanfaatan teknologi digital, produktivitas sektor industri, pertanian, hingga jasa dapat meningkat secara signifikan. Transformasi digital juga mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

H. Kesimpulan

Ekonomi digital dan Revolusi Industri 4.0 merupakan katalis penting dalam transformasi global. Inovasi teknologi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan efisiensi bisnis. Namun, pada saat yang sama, muncul tantangan berupa ketidaksetaraan digital, disrupsi tenaga kerja, dan dominasi raksasa teknologi global. Bagi Indonesia, peluang ekonomi digital sangat besar dengan dukungan jumlah penduduk, pengguna internet, serta pertumbuhan start-

up. Namun, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam mengatasi kesenjangan digital, meningkatkan literasi teknologi, serta memastikan bahwa transformasi digital membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *The Future of Work in the Digital Economy*. Geneva: ILO.
- Klaus Schwab. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., & Sanghvi, S. (2017). *Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation*. McKinsey Global Institute.
- McKinsey Global Institute. (2021). *The Future of Work After COVID-19*. McKinsey & Company.
- OECD. (2019). *Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future*. Paris: OECD Publishing.
- Tapscott, D. (2016). *The Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World*. Penguin.
- UNCTAD. (2019). *Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture - Implications for Developing Countries*. United Nations.
- World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. Washington, DC: World Bank.
- World Economic Forum (WEF). (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. Geneva: WEF.

Bab 6

Perdagangan Internasional dan Kebijakan Perdagangan

(Dr. Lilia Pasca Riani, M.Sc)

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi lintas batas negara yang telah berlangsung sejak berabad-abad lalu, mulai dari Jalur Sutra hingga era globalisasi digital saat ini. Dalam konteks perekonomian modern, perdagangan internasional tidak hanya sekadar pertukaran barang dan jasa, tetapi juga melibatkan investasi, transfer teknologi, tenaga kerja, hingga integrasi kebijakan ekonomi antarnegara. Perdagangan internasional berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat hubungan diplomatik antarbangsa. Namun, praktik perdagangan global juga menghadapi tantangan serius, seperti proteksionisme, ketidakadilan distribusi manfaat, dan dominasi negara-negara maju.

A. Teori Perdagangan Internasional

Untuk memahami mengapa perdagangan internasional penting, para ekonom mengembangkan berbagai teori yang menjelaskan dasar-dasar pertukaran antarnegara.

1. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith, 1776)

Adam Smith menekankan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan jika memproduksi barang yang dapat dihasilkan lebih efisien dibandingkan negara lain. Misalnya, jika Indonesia lebih efisien memproduksi kopi, sementara Jepang lebih efisien memproduksi mobil, maka kedua negara akan diuntungkan dengan saling bertukar.

2. **Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo, 1817)**
Ricardo memperkenalkan konsep bahwa meskipun suatu negara unggul dalam semua bidang produksi, perdagangan tetap akan menguntungkan jika negara tersebut fokus pada produksi barang dengan opportunity cost terendah. Teori ini menjadi fondasi utama perdagangan bebas modern.
3. **Model Heckscher-Ohlin (H-O Model)**
Model ini menekankan bahwa perdagangan internasional ditentukan oleh faktor endowment (modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam). Negara dengan tenaga kerja melimpah cenderung mengekspor barang padat karya, sementara negara dengan modal besar mengekspor barang padat modal.
4. **Teori Siklus Produk (Raymond Vernon)**
Vernon menjelaskan bahwa produk baru biasanya dikembangkan di negara maju, lalu diekspor ke negara berkembang. Seiring waktu, produksi dapat berpindah ke negara dengan biaya tenaga kerja rendah, sehingga menciptakan dinamika perdagangan baru.

B. Manfaat Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional telah menjadi motor penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi global. Melalui interaksi antarnegara, arus barang, jasa, modal, dan teknologi mengalir melintasi batas-batas geografis sehingga menciptakan dampak yang signifikan, baik bagi negara maju maupun berkembang. Adapun manfaat utama dari perdagangan internasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**
Akses terhadap pasar global memberikan peluang besar bagi suatu negara untuk meningkatkan ekspor produk unggulannya. Dengan terbukanya jalur perdagangan internasional, negara dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan volume perdagangan, serta memperoleh

devisa. Hal ini secara langsung mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

2. Diversifikasi Produk untuk Konsumen

Perdagangan internasional memungkinkan konsumen menikmati beragam barang dan jasa yang mungkin tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya, negara tropis dapat mengimpor gandum atau teknologi canggih yang sulit dikembangkan secara lokal. Diversifikasi produk ini tidak hanya memperkaya pilihan konsumen, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap barang yang lebih murah dan berkualitas.

3. Efisiensi dan Peningkatan Inovasi

Persaingan global memaksa perusahaan untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar internasional. Hal ini mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya serta mempercepat inovasi teknologi dan model bisnis. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan standar global akan lebih unggul dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4. Transfer Teknologi dan Pengetahuan

Melalui perdagangan dan investasi asing, teknologi canggih dapat masuk ke negara berkembang. Perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara sering kali membawa teknologi baru, manajemen modern, dan keterampilan tenaga kerja. Transfer teknologi ini mempercepat modernisasi sektor industri, meningkatkan daya saing nasional, serta membuka peluang untuk kolaborasi riset dan pengembangan.

5. Peningkatan Lapangan Kerja

Sektor industri berbasis ekspor mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik di bidang manufaktur, logistik, maupun jasa pendukung lainnya. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional,

lapangan kerja baru terbuka, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tenaga kerja juga berkesempatan memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan industri global.

C. Hambatan dalam Perdagangan Internasional

Meskipun perdagangan internasional memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, diversifikasi produk, hingga peningkatan lapangan kerja, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas dan keadilan dalam sistem perdagangan global. Hambatan-hambatan ini muncul karena perbedaan kepentingan antarnegara, perlindungan terhadap industri domestik, serta kondisi ekonomi-politik dunia yang dinamis.

1. Hambatan Tarif

Hambatan tarif adalah bentuk hambatan perdagangan yang paling umum, berupa pajak atau bea masuk yang dikenakan pada barang impor. Tujuan utama tarif adalah meningkatkan harga barang impor agar tidak lebih murah dari produk domestik, sehingga industri dalam negeri dapat lebih terlindungi. Meskipun efektif untuk menjaga stabilitas sektor tertentu, penerapan tarif yang tinggi dapat mengurangi daya saing ekspor negara mitra, memperlambat arus perdagangan global, serta memicu perang dagang antarnegara.

2. Hambatan Non-Tarif

Selain tarif, terdapat hambatan non-tarif yang sifatnya lebih kompleks, misalnya kuota impor, standar teknis, sertifikasi produk, hingga persyaratan administratif yang rumit. Negara maju seringkali menggunakan instrumen ini untuk menjaga kualitas produk dalam negeri sekaligus membatasi masuknya barang asing. Misalnya, penerapan standar keamanan pangan yang sangat ketat dapat menyulitkan negara berkembang dalam mengeksport

produk pertaniannya, meskipun secara kualitas produk tersebut layak dikonsumsi.

3. Proteksionisme

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri dengan cara membatasi impor, memberikan subsidi pada industri tertentu, atau menciptakan regulasi ketat terhadap barang asing. Walaupun proteksionisme dapat menjaga keberlangsungan sektor tertentu dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang justru dapat menurunkan efisiensi, menghambat inovasi, dan merugikan konsumen karena terbatasnya pilihan serta harga barang yang lebih tinggi.

4. Ketidakadilan Global

Dalam sistem perdagangan internasional, negara berkembang sering kali hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Sementara itu, negara maju yang menguasai teknologi dan modal memperoleh keuntungan lebih besar dari produk turunan dengan nilai jual tinggi. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan global karena negara berkembang sulit keluar dari ketergantungan ekonomi dan menghadapi kesenjangan dalam rantai nilai global.

5. Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam perdagangan internasional. Apresiasi mata uang suatu negara dapat membuat produk ekspor menjadi lebih mahal di pasar global, sehingga mengurangi daya saing. Sebaliknya, depresiasi mata uang bisa meningkatkan daya saing ekspor tetapi sekaligus membuat impor lebih mahal, yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Ketidakpastian nilai tukar seringkali menyulitkan perencanaan bisnis lintas negara.

D. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan merupakan seperangkat aturan, strategi, serta langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengatur aktivitas ekspor dan impor barang maupun jasa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi kepentingan domestik, sekaligus mendorong daya saing di pasar internasional. Setiap negara cenderung menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan kondisi ekonomi, politik, serta arah pembangunan nasional. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam kebijakan perdagangan, yaitu perdagangan bebas dan proteksionisme.

1. Perdagangan Bebas (Free Trade)

Perdagangan bebas adalah suatu sistem ekonomi yang berprinsip pada penghapusan hambatan perdagangan antarnegara. Dalam kerangka ini, pemerintah berupaya meminimalkan campur tangan, baik melalui tarif maupun regulasi non-tarif, sehingga mekanisme pasar dapat berjalan lebih efisien.

Prinsip Utama: Menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan seperti tarif impor, kuota, maupun subsidi.

Lembaga Pendukung: Lahirnya organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO) merupakan wujud komitmen global untuk menciptakan perdagangan bebas yang adil dan transparan.

Manfaat Perdagangan Bebas:

- a. Meningkatkan efisiensi produksi karena setiap negara fokus pada keunggulan komparatifnya.
- b. Menurunkan harga barang bagi konsumen melalui persaingan yang sehat.
- c. Memperluas akses pasar internasional bagi produk domestik.
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui arus barang, jasa, dan investasi.

Namun demikian, perdagangan bebas juga mengandung risiko, terutama bagi negara berkembang dengan industri yang masih lemah. Tanpa perlindungan, industri dalam negeri bisa kalah bersaing dengan produk asing yang lebih kompetitif.

2. Proteksionisme (Protectionism)

Proteksionisme adalah kebijakan yang ditempuh suatu negara untuk membatasi masuknya barang dan jasa dari luar negeri dengan tujuan melindungi industri domestik. Pendekatan ini sering digunakan oleh negara yang masih dalam tahap industrialisasi atau menghadapi persaingan ketat dari luar negeri.

Prinsip Utama: Menjaga kemandirian ekonomi dan melindungi kepentingan domestik melalui pembatasan perdagangan internasional.

Instrumen Proteksionisme:

- a. Tarif: Pajak yang dikenakan terhadap barang impor untuk meningkatkan harga produk asing sehingga kurang kompetitif dibandingkan produk lokal.
- b. Kuota: Pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke pasar domestik.
- c. Subsidi Ekspor: Dukungan dana dari pemerintah kepada produsen lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional.
- d. Regulasi Teknis: Persyaratan administrasi, standar kualitas, atau ketentuan kesehatan dan keselamatan yang menyulitkan produk asing masuk.

Manfaat Proteksionisme:

- a. Melindungi industri baru (infant industry) hingga siap bersaing di pasar global.
- b. Menjaga lapangan kerja di dalam negeri dengan mencegah dominasi produk asing.
- c. Melindungi keamanan dan stabilitas ekonomi nasional dari guncangan eksternal.

d. Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor strategis.

Meskipun memiliki sejumlah keuntungan, proteksionisme dapat menimbulkan inefisiensi ekonomi, menurunkan daya saing jangka panjang, dan berisiko memicu konflik dagang antarnegara.

E. Peran Lembaga Internasional dalam Perdagangan

Perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing negara, tetapi juga oleh peran lembaga-lembaga internasional yang berfungsi menjaga stabilitas, menciptakan aturan bersama, serta mendorong integrasi ekonomi. Lembaga-lembaga ini hadir sebagai fasilitator, mediator, sekaligus regulator agar perdagangan global berjalan lebih adil, transparan, dan berkesinambungan. Berikut beberapa lembaga internasional yang memiliki kontribusi signifikan:

1. World Trade Organization (WTO)

WTO merupakan organisasi internasional yang bertugas mengatur sistem perdagangan dunia. Lembaga ini menggantikan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1995. WTO berperan dalam:

- a. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan aturan perdagangan internasional.
- b. Menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggota.
- c. Mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota.

Dengan adanya WTO, negara-negara anggota mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan perdagangan lintas batas, sehingga tercipta iklim perdagangan yang lebih stabil dan kompetitif.

2. International Monetary Fund (IMF)

IMF merupakan lembaga internasional yang fokus menjaga stabilitas moneter dunia. Dalam konteks perdagangan internasional, peran IMF adalah:

- a. Menyediakan pinjaman bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran.
- b. Memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi makro untuk menjaga stabilitas kurs mata uang.
- c. Mencegah terjadinya krisis keuangan global yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan.

IMF membantu memastikan sistem pembayaran internasional berjalan lancar, sehingga transaksi perdagangan antarnegara tidak terganggu oleh gejolak finansial.

3. World Bank

World Bank berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Dukungan tersebut dilakukan melalui:

- a. Penyediaan pinjaman jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, energi, dan sektor produktif lainnya.
- b. Transfer pengetahuan dan keahlian teknis dalam manajemen ekonomi.
- c. Pengentasan kemiskinan yang secara tidak langsung memperkuat daya beli masyarakat.

Dengan adanya pembangunan yang dibiayai oleh World Bank, negara-negara berkembang dapat memperkuat daya saing ekspor mereka di pasar global.

4. ASEAN Economic Community (AEC)

AEC adalah bentuk integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara yang resmi diberlakukan pada tahun 2015. Peran AEC dalam perdagangan antara lain:

- a. Mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi kawasan ASEAN.
- b. Menghapus hambatan tarif dan non-tarif antarnegara ASEAN.
- c. Meningkatkan arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal.

AEC memberikan kesempatan bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memperluas akses pasar regional serta meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.

F. Perdagangan Internasional Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memegang peran strategis dalam arus perdagangan global. Posisi geografis Indonesia yang berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia (sea lane of communication) juga memberikan keuntungan tersendiri dalam memperluas hubungan dagang internasional.

Komoditas Ekspor Utama:

1. Kelapa sawit (CPO dan turunannya) yang menjadi penyumbang devisa terbesar.
2. Batu bara sebagai sumber energi global.
3. Karet dan kopi yang sudah lama dikenal di pasar dunia.
4. Tekstil dan produk elektronik yang semakin meningkat perannya seiring dengan industrialisasi.

Mitra Dagang Utama:

Indonesia menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara, antara lain:

1. Tiongkok sebagai mitra terbesar, terutama dalam ekspor bahan mentah dan impor produk manufaktur.
2. Jepang sebagai pasar utama bagi energi dan sumber daya mineral.
3. Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor produk tekstil, alas kaki, dan elektronik.
4. Uni Eropa dengan permintaan tinggi terhadap produk pertanian dan industri kreatif.
5. ASEAN sebagai kawasan regional yang terintegrasi melalui skema free trade area.

Tantangan:

1. Ketergantungan pada komoditas primer, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.
2. Keterbatasan infrastruktur logistik, yang mengurangi daya saing ekspor.
3. Hambatan non-tarif dari negara tujuan ekspor, seperti standar lingkungan dan sertifikasi.

Peluang:

1. Hilirisasi industri, yaitu peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya alam sebelum diekspor.
2. Penguatan ekonomi digital untuk memperluas pasar ekspor UMKM.
3. Optimalisasi pasar regional ASEAN, memanfaatkan kedekatan geografis dan integrasi ekonomi kawasan.

G. Penutup

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global. Dengan adanya arus barang, jasa, modal, serta teknologi antarnegara, kegiatan ekonomi dapat berkembang lebih cepat dan merata. Teori-teori perdagangan internasional, mulai dari keunggulan absolut hingga teori keunggulan komparatif dan modern, memberikan fondasi konseptual untuk memahami mengapa negara melakukan perdagangan serta bagaimana mereka memperoleh manfaat darinya. Di sisi lain, kebijakan perdagangan baik berupa proteksi maupun liberalisasi menunjukkan bagaimana negara menavigasi kompleksitas hubungan ekonomi global sesuai dengan kepentingan nasional. Keterlibatan lembaga internasional seperti WTO, IMF, World Bank, hingga komunitas regional seperti ASEAN Economic Community, menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil, stabil, dan terintegrasi.

Bagi Indonesia, perdagangan internasional membuka peluang besar untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, khususnya melalui ekspor komoditas unggulan dan pengembangan industri hilir. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada komoditas primer, fluktuasi harga global, dan keterbatasan infrastruktur perlu segera diatasi. Oleh karena itu, integrasi yang efektif ke dalam sistem perdagangan dunia harus dibarengi dengan kebijakan adaptif, penguatan kapasitas industri, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah strategis dan konsistensi kebijakan, perdagangan internasional tidak hanya menjadi sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam kancah global.

Referensi

- Bank Dunia. (2022). World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery. Washington DC: The World Bank.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2018). International Economics: Theory and Policy (10th ed.). Boston: Pearson.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Kinerja Perdagangan Indonesia 2022. Jakarta: Kemendag RI.
- Mankiw, N. G. (2020). Principles of Economics (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Salvatore, D. (2019). International Economics (13th ed.). Hoboken: Wiley.
- Sukirno, S. (2021). Ekonomi Pembangunan: Teori dan Masalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, T. (2020). Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- World Trade Organization. (2023). World Trade Statistical Review 2023. Geneva: WTO.
- International Monetary Fund. (2023). World Economic Outlook: Navigating Global Divergences. Washington DC: IMF.
- ASEAN Secretariat. (2022). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Jakarta: ASEAN..

Bab 7

Isu Geopolitik dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Global

(Heriyana)

A. Pendahuluan

Geopolitik merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perekonomian global. Hubungan antarnegara, kebijakan luar negeri, serta konflik wilayah senantiasa membentuk arus perdagangan internasional, aliran investasi, dan kestabilan pasar keuangan. Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, perubahan dalam lanskap geopolitik tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok global, nilai mata uang, harga energi, serta iklim investasi di berbagai belahan dunia.

Geopolitik dapat dipahami sebagai bagaimana faktor geografi, kekuasaan politik, serta kepentingan ekonomi memengaruhi interaksi antarnegara. Faktor ini terlihat jelas dalam perebutan sumber daya alam, jalur perdagangan strategis, maupun penguasaan teknologi modern. Perang dagang, sanksi ekonomi, serta perubahan aliansi politik internasional sering kali menimbulkan ketidakpastian yang langsung dirasakan oleh pasar global. Misalnya, konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya memengaruhi stabilitas kawasan Eropa Timur, tetapi juga mengguncang pasokan energi dunia dan meningkatkan harga minyak serta gas global. Demikian pula, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan

berdampak terhadap jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dengan Amerika dan Eropa.

Selain konflik dan ketegangan, geopolitik juga berperan dalam membentuk kerja sama regional maupun global. Perjanjian perdagangan bebas, blok ekonomi, hingga aliansi pertahanan memiliki implikasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya. ASEAN, Uni Eropa, dan BRICS merupakan contoh nyata bagaimana geopolitik membentuk dinamika ekonomi dengan menciptakan peluang pasar yang lebih luas sekaligus menghadirkan tantangan kompetisi yang semakin ketat.

Bagi Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, isu geopolitik memiliki dampak yang signifikan. Stabilitas kawasan Asia Tenggara, hubungan dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, serta keterlibatan dalam forum global seperti G20, menjadikan Indonesia harus cermat membaca dinamika geopolitik dunia. Kesalahan dalam merespons situasi geopolitik dapat melemahkan daya saing nasional, sementara strategi yang tepat dapat membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, memahami isu geopolitik bukan hanya penting bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi pelaku bisnis, investor, dan masyarakat luas. Perubahan geopolitik akan terus mewarnai perkembangan ekonomi global, sehingga analisis yang mendalam terhadap tren dan dinamika tersebut menjadi kebutuhan strategis. Bab ini akan membahas berbagai isu geopolitik utama, pengaruhnya terhadap ekonomi global, tantangan yang ditimbulkan, serta peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menghadapi ketidakpastian global.

B. Konsep Geopolitik dalam Ekonomi Global

Geopolitik secara sederhana dapat dipahami sebagai kajian mengenai bagaimana faktor geografis, kekuatan politik, strategi militer, dan hubungan antarnegara memengaruhi keputusan serta arah kebijakan internasional. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah atau pengaruh politik, melainkan juga memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas dan perkembangan perekonomian global. Dalam perspektif ekonomi global, geopolitik berperan penting dalam menentukan berbagai aspek berikut:

1. Akses terhadap Sumber Daya Alam

Sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan mineral strategis (misalnya litium, kobalt, dan nikel) menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi modern. Negara-negara dengan cadangan sumber daya yang besar sering kali memegang posisi tawar yang tinggi dalam perdagangan internasional. Sebaliknya, negara yang sangat bergantung pada impor energi dan bahan mentah menjadi rentan terhadap ketidakpastian geopolitik. Misalnya, ketegangan di Timur Tengah dapat langsung memengaruhi harga minyak dunia dan mengganggu stabilitas ekonomi global.

2. Keamanan Jalur Perdagangan Internasional

Jalur perdagangan laut seperti Selat Malaka, Selat Hormuz, dan Terusan Suez adalah nadi ekonomi dunia. Gangguan di salah satu jalur strategis ini, baik akibat konflik, pembajakan, maupun ketegangan politik, dapat menyebabkan lonjakan biaya logistik, keterlambatan distribusi barang, dan inflasi global. Contohnya, insiden kapal Ever Given yang terjebak di Terusan Suez tahun 2021 menimbulkan kerugian miliaran dolar akibat terhambatnya arus perdagangan internasional.

3. Kebijakan Aliansi dan Blok Perdagangan

Negara-negara cenderung membentuk aliansi politik maupun blok perdagangan untuk memperkuat posisi tawar

mereka. Contohnya adalah Uni Eropa (UE), ASEAN, atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA/USMCA). Aliansi semacam ini tidak hanya memengaruhi perdagangan barang dan jasa, tetapi juga investasi lintas batas, standar regulasi, hingga kebijakan moneter regional.

4. Stabilitas Politik dan Kepercayaan Investor

Stabilitas politik suatu negara menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kepercayaan investor. Negara yang rawan konflik politik, kudeta, atau ketidakpastian hukum akan dianggap berisiko tinggi, sehingga arus modal asing cenderung keluar (capital flight). Sebaliknya, negara dengan stabilitas politik dan keamanan yang kuat lebih menarik bagi investasi jangka panjang.

Dengan kata lain, setiap gejolak geopolitik, baik berupa konflik bersenjata, perang dagang, ketegangan diplomatik, maupun perubahan aliansi internasional, dapat mengubah:

1. Arah aliran modal global, misalnya investor memindahkan aset ke negara yang lebih stabil.
2. Distribusi perdagangan, ketika negara mengalihkan pasokan impor/ekspor karena embargo atau sanksi.
3. Nilai tukar mata uang, akibat pergeseran kepercayaan pasar.
4. Harga energi dan komoditas strategis, yang berdampak langsung pada inflasi global.

Oleh karena itu, memahami hubungan erat antara geopolitik dan ekonomi global menjadi penting, tidak hanya bagi para pembuat kebijakan, tetapi juga bagi pelaku bisnis, investor, dan masyarakat luas yang merasakan dampak akhirnya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Isu Geopolitik Utama di Dunia

Beberapa isu geopolitik utama yang berpengaruh besar terhadap ekonomi global adalah:

1. Ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok

Persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bukan hanya terkait politik, tetapi juga perebutan dominasi ekonomi dan teknologi. Isu seperti:

- a. Perang dagang (tarif impor dan hambatan perdagangan).
- b. Persaingan teknologi (5G, kecerdasan buatan, semikonduktor).
- c. Pengaruh terhadap rantai pasok global.

Dampaknya adalah meningkatnya biaya produksi, ketidakpastian investasi, dan pergeseran pusat manufaktur ke negara lain.

2. Perang Rusia-Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 telah menimbulkan guncangan besar pada pasar global, terutama pada:

- a. Energi: Harga minyak dan gas melonjak karena Rusia adalah salah satu eksportir utama.
- b. Pangan: Ukraina merupakan salah satu pengeksportir gandum terbesar dunia.
- c. Keuangan: Sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia memengaruhi sistem pembayaran global (SWIFT).

3. Ketidakstabilan Timur Tengah

Wilayah Timur Tengah sering menjadi episentrum konflik geopolitik, terutama terkait:

- a. Perebutan pengaruh di antara negara-negara Teluk.
- b. Ketergantungan dunia pada minyak mentah dari kawasan ini.
- c. Konflik Israel-Palestina yang memengaruhi hubungan diplomatik dan stabilitas ekonomi kawasan.

4. Brexit dan Dampaknya terhadap Uni Eropa

Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) membawa implikasi ekonomi berupa:

- a. Disrupsi perdagangan antara Inggris dan negara anggota Uni Eropa.
- b. Perubahan regulasi bisnis dan investasi.

- c. Pergeseran pusat keuangan internasional dari London ke kota lain di Eropa.
- 5. Perubahan Iklim dan Geopolitik Energi
 - Isu lingkungan kini juga masuk ke ranah geopolitik. Peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan menimbulkan:
 - a. Persaingan investasi dalam energi hijau.
 - b. Ketegangan antarnegara produsen minyak dan gas.
 - c. Perubahan strategi industri energi global.

D. Dampak Isu Geopolitik terhadap Ekonomi Global

Isu geopolitik memiliki sejumlah dampak signifikan terhadap perekonomian dunia, antara lain:

1. Fluktuasi Harga Energi dan Komoditas
 - Konflik di wilayah penghasil minyak dapat memicu lonjakan harga energi. Hal ini berdampak pada biaya produksi dan inflasi global.
2. Gangguan Rantai Pasok Global
 - Perang dagang atau konflik bersenjata dapat menghambat distribusi barang, meningkatkan biaya logistik, dan mengurangi efisiensi perdagangan.
3. Ketidakpastian Investasi
 - Ketegangan geopolitik meningkatkan risiko bagi investor, sehingga modal asing cenderung menunggu atau dialihkan ke negara yang lebih stabil.
4. Perubahan Aliansi Ekonomi
 - Blok-blok baru perdagangan dan keuangan muncul akibat pergeseran geopolitik, misalnya BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) yang menantang dominasi ekonomi Barat.
5. Inflasi Global dan Ketidakstabilan Moneter
 - Gangguan suplai energi dan pangan mendorong inflasi, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat suku bunga global dan stabilitas nilai tukar.

E. Peran Indonesia dalam Konteks Geopolitik Global

Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional (Selat Malaka dan Samudra Pasifik), Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian global. Dalam menghadapi isu geopolitik, Indonesia dapat memaksimalkan peran dengan:

1. **Memperkuat Diplomasi Ekonomi**
Aktif dalam forum internasional seperti G20, ASEAN, dan WTO untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
2. **Diversifikasi Pasar Ekspor**
Mengurangi ketergantungan pada satu atau dua negara mitra dagang, dengan membuka pasar baru di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.
3. **Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi**
Mengantisipasi guncangan global melalui peningkatan produksi domestik dan investasi energi terbarukan.
4. **Menjadi Pusat Produksi Alternatif**
Dalam konteks pergeseran rantai pasok global akibat persaingan AS-Tiongkok, Indonesia memiliki peluang menarik investasi manufaktur dan teknologi.

F. Tantangan dan Peluang

Dalam menghadapi dinamika geopolitik global, setiap negara dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang yang dapat menentukan arah pembangunan ekonominya. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, tidak terkecuali.

Tantangan

1. **Tekanan Eksternal akibat Konflik Global**
Konflik bersenjata, ketegangan antarblok ekonomi, maupun rivalitas kekuatan besar dunia dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Misalnya, perang dagang atau konflik energi dapat meningkatkan harga impor bahan baku,

menghambat ekspor, serta menciptakan inflasi yang tidak terkendali.

2. Ketergantungan pada Komoditas Primer

Sebagian besar perekonomian Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas primer, seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Ketika harga global mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian geopolitik, perekonomian nasional menjadi rentan terhadap guncangan eksternal.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, keterbatasan infrastruktur fisik maupun teknologi digital dapat menghambat daya saing. Keterlambatan dalam transformasi teknologi membuat Indonesia sulit memanfaatkan peluang yang muncul dari pergeseran rantai pasok global.

Peluang

1. Menjadi Mediator dalam Konflik Kawasan

Dengan posisi geopolitik yang strategis dan identitas sebagai negara non-blok, Indonesia berpotensi menjadi penengah dalam berbagai konflik kawasan. Diplomasi aktif tidak hanya memperkuat posisi politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan internasional terhadap stabilitas ekonomi nasional.

2. Memanfaatkan Bonus Demografi

Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan modal penting bagi pembangunan industri dan inovasi. Apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, bonus demografi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Mengembangkan Ekonomi Hijau dan Digital

Tren global saat ini mengarah pada ekonomi hijau (green economy) dan transformasi digital. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan, ekowisata, serta ekonomi digital berbasis UMKM dan

startup. Langkah ini sekaligus dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas primer dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan geopolitik.

G. Penutup

Geopolitik merupakan faktor kunci yang terus membentuk arah perekonomian dunia. Konflik, aliansi, serta kebijakan internasional menimbulkan dampak luas terhadap perdagangan, investasi, dan stabilitas moneter global. Indonesia, dengan posisi strategis dan potensi besar, memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjadi korban perubahan geopolitik, tetapi juga aktor penting yang mampu memanfaatkan peluang dari dinamika tersebut. Oleh karena itu, strategi diplomasi ekonomi, penguatan industri dalam negeri, serta kesiapan menghadapi krisis global menjadi modal utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ke depan, kemampuan Indonesia dalam membaca arah geopolitik dan merespons secara adaptif akan menentukan posisinya dalam percaturan ekonomi internasional, apakah sekadar pengikut arus atau justru menjadi pusat gravitasi baru di kawasan.

Referensi

- Baldwin, D. A. (2016). *Power and International Relations: A Conceptual Approach*. Princeton University Press.
- Friedman, G. (2009). *The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century*. Anchor Books.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kissinger, H. (2014). *World Order*. Penguin Books.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics*. Updated Edition. W.W. Norton & Company.
- OECD. (2022). *Global Economic Outlook 2022*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Roubini, N. (2022). *Megathreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future*. Little, Brown and Company.
- World Bank. (2023). *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges*. Washington, DC: The World Bank.

Bab 8

Kebijakan Ekonomi Makro Global

(Sony Tian Dhora, S.E., M.E.)

A. Pendahuluan

Kebijakan ekonomi makro global merupakan seperangkat strategi, instrumen, dan langkah kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengatur, menyeimbangkan, dan menstabilkan perekonomian mereka di tengah kompleksitas dinamika ekonomi internasional. Kebijakan ini mencakup upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengendalikan inflasi, menekan tingkat pengangguran, menyeimbangkan neraca pembayaran, serta memastikan stabilitas nilai tukar mata uang.

Di era globalisasi yang semakin intensif, kebijakan ekonomi makro tidak lagi bersifat “tertutup” atau hanya berfokus pada perekonomian domestik. Sebaliknya, kebijakan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan keterkaitan dan ketergantungan lintas negara. Perdagangan internasional, arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), volatilitas harga komoditas global seperti minyak, gas, dan pangan, serta pergerakan modal jangka pendek di pasar keuangan internasional merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi makro suatu negara.

Dinamika global yang cepat mulai dari inovasi teknologi, perubahan iklim, hingga fluktuasi geopolitik menciptakan tantangan dan peluang baru bagi pembuat kebijakan.

Misalnya, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) untuk menaikkan suku bunga dapat memicu aliran keluar modal dari negara berkembang, melemahkan nilai tukar mereka, dan menekan pertumbuhan ekonomi domestik. Demikian pula, kebijakan fiskal ekspansif di Tiongkok dapat berdampak positif pada permintaan global terhadap komoditas, yang pada gilirannya menguntungkan negara-negara pengekspor bahan mentah.

Sejarah menunjukkan bahwa krisis global seperti Krisis Finansial Asia 1997, Krisis Finansial Global 2008, dan Pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa keterkaitan ekonomi antarnegara sangat erat. Kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, dan regulasi keuangan yang diambil oleh satu negara, terutama ekonomi besar, dapat memberikan efek domino ke berbagai belahan dunia. Hal ini menuntut koordinasi dan sinergi kebijakan melalui forum multilateral seperti G20, IMF, World Bank, dan WTO.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro global tidak hanya penting bagi para ekonom, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat luas. Memahami interaksi kebijakan antarnegara dapat membantu dalam mengantisipasi risiko, memanfaatkan peluang, dan merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang adaptif, resilien, serta berdaya saing di pasar global.

B. Pilar Utama Kebijakan Ekonomi Makro Global

Kebijakan ekonomi makro global berdiri di atas tiga pilar utama yang saling berhubungan dan membentuk kerangka besar pengelolaan perekonomian suatu negara dalam konteks internasional. Ketiga pilar ini adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan perdagangan dan investasi internasional. Ketiganya bekerja secara sinergis, di mana perubahan pada salah satu pilar akan

memberikan dampak pada pilar lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan Negara termasuk pajak, bea masuk, retribusi, dan sumber pendapatan lain serta pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan, membayar utang, dan mendanai program-program sosial. Di tingkat global, kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam memengaruhi:

- a. Daya beli masyarakat melalui pengurangan atau peningkatan beban pajak.
- b. Distribusi pendapatan lewat program subsidi, bantuan sosial, dan belanja publik.
- c. Daya saing ekonomi dengan mengarahkan belanja negara ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan riset teknologi.

Contoh nyata implementasi kebijakan fiskal global:

- a. Stimulus Fiskal Amerika Serikat 2008 pasca-krisis keuangan global yang menyuntikkan ratusan miliar dolar untuk menyelamatkan industri otomotif, perbankan, dan perumahan.
- b. Paket Pemulihan Ekonomi Uni Eropa pasca-pandemi COVID-19 yang berfokus pada transisi energi hijau dan digitalisasi ekonomi.

Kebijakan fiskal yang terkoordinasi antarnegara sering kali menjadi kunci pemulihan ekonomi global, khususnya ketika terjadi resesi yang sifatnya lintas batas.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan stabilitas harga. Dalam konteks global, perubahan kebijakan moneter di satu Negara terutama negara dengan

ekonomi besar dapat memicu gelombang efek ke negara lain melalui:

- a. Arus modal internasional, di mana investor memindahkan dananya ke negara dengan imbal hasil lebih tinggi.
- b. Pergerakan nilai tukar, yang dapat memengaruhi daya saing ekspor dan impor.
- c. Stabilitas harga global, terutama pada komoditas utama seperti minyak, emas, dan pangan.

Contoh nyata:

- ❖ Kebijakan Suku Bunga The Federal Reserve (The Fed) yang memengaruhi nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang. Kenaikan suku bunga acuan AS umumnya menyebabkan penguatan dolar dan melemahkan mata uang negara-negara berkembang, sehingga meningkatkan beban utang luar negeri.

Kebijakan moneter global juga berperan penting dalam mengantisipasi inflasi internasional, krisis keuangan, serta menjaga kestabilan sistem perbankan.

3. Kebijakan Perdagangan dan Investasi Internasional

Pilar ketiga adalah kebijakan yang mengatur arus barang, jasa, modal, dan investasi lintas negara. Kebijakan ini meliputi:

- a. Perjanjian perdagangan bebas untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif.
- b. Tarif impor dan ekspor sebagai instrumen proteksi atau dorongan industri dalam negeri.
- c. Regulasi investasi asing yang menentukan sektor mana saja yang terbuka untuk investor luar.

Dampaknya terhadap perekonomian global mencakup:

- a. Pertumbuhan GDP melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi.
- b. Perbaikan neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor.

- c. Penyerapan tenaga kerja akibat masuknya investasi pada sektor padat karya.

Contoh nyata:

- ❖ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan negara-negara Asia dan Pasifik. Perjanjian ini diharapkan mampu meningkatkan integrasi ekonomi regional dan daya saing global.

Secara keseluruhan, ketiga pilar kebijakan ekonomi makro global ini saling berinteraksi dan memerlukan koordinasi yang baik, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam dunia yang semakin terhubung, kegagalan mengelola salah satu pilar dapat memicu ketidakstabilan ekonomi lintas negara, sedangkan keberhasilan implementasinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Keterkaitan dengan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan ekonomi makro di tingkat global. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product/GDP*) menjadi indikator utama yang mencerminkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu. Di tingkat global, kenaikan agregat GDP menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia, peningkatan kapasitas produksi, dan bertambahnya konsumsi. Kebijakan makro seperti paket stimulus ekonomi, investasi lintas negara, dan pengurangan hambatan perdagangan terbukti memengaruhi GDP secara signifikan, seperti yang terjadi pada pemulihan ekonomi global pasca-pandemi COVID-19 pada 2021-2022, di mana kebijakan fiskal ekspansif dan

pelonggaran moneter di negara maju mendorong lonjakan permintaan internasional.

Selain itu, Produk Nasional Bruto (*Gross National Product/ GNP*) juga berperan penting dalam mengukur kontribusi warga terhadap perekonomian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Indikator ini sangat relevan bagi negara-negara yang memiliki jumlah tenaga kerja migran besar atau perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai wilayah, karena remitansi dan laba investasi luar negeri dapat menjadi penyumbang signifikan pada GNP. Filipina dan Nepal, misalnya, memperoleh porsi besar GNP dari remitansi pekerja migran di Timur Tengah dan negara maju.

Kebijakan moneter dan fiskal negara dengan perekonomian besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa juga memberikan dampak lintas batas yang signifikan terhadap pendapatan nasional negara lain. Melalui jalur perdagangan, perubahan tarif atau kuota impor dapat mengubah arus barang dan memengaruhi pendapatan nasional mitra dagang. Melalui jalur investasi, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dapat memicu aliran modal keluar dari negara berkembang, melemahkan nilai tukar, dan menekan pertumbuhan GDP. Sementara melalui jalur nilai tukar, intervensi bank sentral atau gejolak pasar mata uang dapat memengaruhi harga ekspor-impor dan pada akhirnya berimbas pada pendapatan nasional.

Dengan demikian, GDP dan GNP bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan cerminan langsung dari efektivitas kebijakan ekonomi makro di era globalisasi. Memahami hubungan antara kebijakan makro global dan pendapatan nasional menjadi kunci bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyusun strategi adaptif yang mampu menghadapi dinamika ekonomi internasional yang semakin kompleks.

D. Tantangan Kebijakan Ekonomi Makro di Era Global

Kebijakan ekonomi makro global saat ini berada di bawah tekanan kuat dari berbagai faktor ketidakpastian yang terus meningkat. Ketidakpastian global, baik yang bersumber dari krisis finansial, perubahan iklim, pandemi, maupun konflik geopolitik, terus mendominasi risiko ekonomi internasional. Baru-baru ini, survei menunjukkan bahwa sekitar 59% responden menyatakan bahwa instabilitas geopolitik dan perubahan kebijakan perdagangan sama-sama dilihat sebagai gangguan terbesar pada ekonomi global. Perang Rusia-Ukraina, misalnya, telah menyebabkan lonjakan harga energi dan pangan yang menyebar ke seluruh dunia, memicu inflasi dan ketidakstabilan sosial ekonomi. Kondisi ketidakpastian ini semakin diperparah oleh tensi perdagangan AS dan Cina, yang berkontribusi pada penurunan investasi dan ketegangan global.

Kedua, ketimpangan ekonomi global antara negara maju dan berkembang terus menjadi tantangan serius. Negara maju yang memiliki akses teknologi dan modal tinggi terus tumbuh lebih cepat, sementara negara berkembang justru tertinggal, khususnya yang bergantung pada ekspor komoditas dasar yang rentan terhadap fluktuasi pasar. Fenomena ini bertahan dan bahkan melebar karena minimnya transfer teknologi dan rendahnya investasi asing langsung ke negara berkembang. Selanjutnya, fluktuasi harga komoditas tetap menjadi ancaman struktural, terutama bagi negara pengimpor. Harga pangan dan energi yang mudah bergerak menaik dapat merusak neraca perdagangan dan memperberat tekanan inflasi domestik. Di sisi lain, negara pengekspor komoditas bisa mengalami penurunan tajam dalam penerimaan ekspor ketika harga dunia menurun.

Kemudian, transformasi digital dan disrupsi teknologi menghadirkan peluang sekaligus risiko besar. Di satu sisi, digitalisasi termasuk penggunaan AI, smart grids, dan analitik prediktif dapat menekan biaya operasional dan membentuk stabilitas harga. Namun, dalam jangka panjang, otomatisasi dan AI diperkirakan dapat menghapus hingga 50% pekerjaan di sektor keuangan, dukungan, dan media, sehingga memicu gelombang pengangguran baru. Selain itu, ketimpangan akses teknologi memperlebar jurang antara negara-negara maju dan berkembang dalam hal kesiapan digital dan inovasi ekonomi.

kebijakan fiskal yang mendominasi (*fiscal dominance*) menjadi risiko serius, terutama di negara-negara dengan utang publik tinggi. Saat kebutuhan pembiayaan pemerintah mempersempit ruang gerak bank sentral, kebijakan moneter beralih lebih mendukung belanja fiskal, yang justru bisa memicu tekanan inflasi dan meruntuhkan kredibilitas bank sentral. Tren deglobalisasi yang mana terjadi peningkatan proteksionisme serta fragmentasi perdagangan dan rantai pasok berpotensi menghambat pertumbuhan global. Pemulangan produksi (*reshoring*) dan pembatasan teknologi lintas batas dapat mengurangi efisiensi global dan memperlambat laju inovasi khususnya berdampak pada negara-negara berpenghasilan rendah yang bergantung pada transfer teknologi

E. Strategi Implementasi Kebijakan Ekonomi Makro Global

Agar kebijakan ekonomi makro global dapat berjalan efektif di tengah kompleksitas tantangan internasional, diperlukan strategi implementasi yang terukur, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika global. Salah satu langkah utama adalah koordinasi internasional melalui forum-forum multilateral seperti G20, International Monetary Fund (IMF), dan World Bank. Melalui platform ini, negara-negara dapat saling bertukar informasi,

menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, serta merumuskan respons kolektif terhadap krisis global. Koordinasi ini terbukti krusial saat krisis finansial 2008 dan pandemi COVID-19, di mana stimulus fiskal dan kebijakan pelonggaran moneter terkoordinasi mampu mempercepat pemulihan ekonomi global.

Strategi berikutnya adalah diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau komoditas tertentu. Diversifikasi tidak hanya mencakup sektor produksi dan perdagangan, tetapi juga pasar tujuan ekspor, sumber investasi, dan inovasi teknologi. Negara-negara yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas primer seperti minyak atau batu bara rentan terhadap fluktuasi harga global, sehingga pengembangan sektor industri, jasa, dan teknologi menjadi prioritas untuk menciptakan ketahanan jangka panjang. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi bagi daya saing ekonomi. Investasi pada pendidikan, kesehatan, teknologi digital, dan infrastruktur fisik seperti transportasi dan energi terbarukan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menarik investasi asing. Dalam konteks global, negara dengan infrastruktur modern dan SDM yang terampil akan lebih siap bersaing di pasar internasional dan memanfaatkan peluang ekonomi digital yang berkembang pesat.

Selanjutnya, diperlukan penguatan ketahanan ekonomi nasional untuk mengantisipasi gejolak global. Hal ini mencakup pembangunan cadangan devisa yang memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar, penguatan sektor pertanian untuk menjamin ketahanan pangan, serta pengembangan energi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Negara yang memiliki cadangan devisa besar dan ketahanan pangan-energi yang kuat cenderung lebih stabil menghadapi krisis global, baik

yang bersifat ekonomi, geopolitik, maupun lingkungan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan disertai koordinasi lintas negara, kebijakan ekonomi makro global dapat berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan menciptakan sistem ekonomi dunia yang lebih tangguh menghadapi guncangan masa depan.

F. Kesimpulan

Kebijakan ekonomi makro global pada hakikatnya memerlukan koordinasi lintas negara dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika internasional yang semakin kompleks. Indikator pendapatan nasional, seperti Produk Domestik Bruto (GDP) dan Produk Nasional Bruto (GNP), tetap menjadi barometer utama untuk menilai keberhasilan kebijakan, namun pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Hubungan perdagangan, arus investasi, pergerakan nilai tukar, dan perubahan teknologi telah mengikat perekonomian dunia dalam jaringan yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan di satu negara sering kali ditentukan oleh kemampuan menyesuaikannya dengan kondisi dan respons global.

Masa depan perekonomian dunia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara-negara untuk mengelola tantangan global secara kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun respons terpadu terhadap krisis, baik itu krisis finansial, pandemi, perubahan iklim, maupun ketegangan geopolitik. Inovasi, terutama dalam bidang teknologi, energi bersih, dan model bisnis digital, diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif sekaligus ramah lingkungan. Sementara itu, prinsip keberlanjutan harus menjadi landasan agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam jangka

pendek, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Dengan kombinasi koordinasi internasional, inovasi berkelanjutan, dan pemahaman mendalam terhadap keterkaitan ekonomi antarnegara, kebijakan ekonomi makro global dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga kestabilan, tetapi juga mendorong kemajuan bersama menuju kemakmuran dunia yang lebih merata dan tahan terhadap guncangan masa depan.

Referensi

- Asian Development Bank (ADB). (2024). Asian Economic Integration Report 2024: Harnessing Technology for Resilient Growth. Manila: ADB.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (1996). Principles of Economics (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- European Commission. (2023). EU Economic Recovery and Resilience Facility: Progress Report. Brussels: European Commission.
- Federal Reserve Board. (2024). Monetary Policy Report - July 2024. Washington, D.C.: Board of Governors of the Federal Reserve System.
- International Monetary Fund (IMF). (2025). World Economic Outlook, April 2025: Navigating Global Crosscurrents. Washington, D.C.: IMF.
- McKinsey & Company. (2025). Global Economics Intelligence Executive Summary - August 2025. Retrieved from: <https://www.mckinsey.com>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). OECD Economic Outlook. Paris: OECD Publishing.
- Reuters. (2025, August 5). Trading Day: Stagflation-ISM. Retrieved from: <https://www.reuters.com>
- Roubini, N. (2023). MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them. New York: Little, Brown and Company.
- State Street Global Advisors. (2024). Five Forces Reshaping the Global Economy. Boston, MA: State Street Corporation.

- United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2024). World Economic Situation and Prospects 2024. New York: United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). Trade and Development Report 2024: Development Prospects in a Fractured World. Geneva: UNCTAD.
- World Bank. (2025). Global Economic Prospects: Diverging Growth Paths and Global Risks. Washington, D.C.: The World Bank Group.
- World Trade Organization (WTO). (2024). World Trade Statistical Review 2024. Geneva: WTO.

Bab 9

Ekonomi Berkelanjutan dan Pembangunan Hijau

(Frans Antoni Sihite, S.Pd.,M.M)

A. Pendahuluan

Perekonomian global telah mengalami transformasi besar dalam dua dekade terakhir. Kemajuan teknologi informasi, deregulasi perdagangan, dan mobilitas modal telah menjadikan dunia lebih terhubung daripada sebelumnya. Negara-negara semakin tergantung satu sama lain dalam rantai pasok global, perdagangan barang dan jasa, serta aliran investasi. Perubahan ini mempercepat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah, namun juga menimbulkan ketidakpastian dan ketimpangan yang nyata.

Globalisasi ekonomi tidak hanya memperluas pasar dan menciptakan peluang pertumbuhan, tetapi juga memperbesar risiko kontaminasi krisis antarnegara. Krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 merupakan dua contoh nyata bagaimana guncangan di satu negara atau sektor dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dalam konteks ini, stabilitas ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang lebih luas.

Integrasi pasar telah membawa manfaat dalam hal efisiensi produksi dan distribusi. Namun, manfaat tersebut tidak selalu dirasakan secara merata. Negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai nilai global. Selain itu, ketergantungan terhadap pasar luar membuat banyak

negara rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan kebijakan ekonomi dari negara mitra dagangnya.

Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti otomasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi telah menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memicu kekhawatiran akan pengangguran struktural dan ketimpangan pendapatan. Teknologi menjadi kekuatan pendorong utama ekonomi global masa kini, namun juga menantang model ekonomi tradisional yang selama ini berlaku.

Organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO semakin dituntut untuk memainkan peran strategis dalam mengelola isu-isu global. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini seringkali dipertanyakan, terutama dalam merespons krisis yang membutuhkan pendekatan cepat dan kolaboratif. Reformasi tata kelola global menjadi salah satu agenda penting dalam konteks perekonomian dunia yang semakin kompleks.

Bab ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai isu krusial dalam perekonomian global, baik yang bersifat struktural maupun temporer. Isu-isu tersebut mencakup ketimpangan ekonomi, ketidakstabilan geopolitik, krisis energi, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi. Pemahaman atas dinamika ini penting untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Akhirnya, bab ini juga akan mengulas kebijakan-kebijakan ekonomi global yang telah diterapkan, serta prospek perekonomian dunia ke depan. Dengan pendekatan yang komprehensif, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi pembaca untuk memahami kompleksitas perekonomian global sekaligus memikirkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Isu-Isu Utama dalam Perekonomian Global

1. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan paling mendesak dalam perekonomian global saat ini. Meskipun globalisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia, hasil dari pertumbuhan tersebut tidak terbagi secara merata. Negara-negara maju umumnya memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara berkembang, menciptakan jurang kesejahteraan yang semakin dalam antarnegara.

Di dalam satu negara, ketimpangan juga semakin mencolok antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Sektor-sektor tertentu, terutama yang berorientasi pada teknologi dan pasar global, mengalami lonjakan pendapatan yang signifikan. Sementara itu, pekerja di sektor informal, manufaktur tradisional, dan pertanian sering kali tertinggal dan mengalami stagnasi pendapatan. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas hidup, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja.

Peningkatan ketimpangan juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ketika sebagian besar kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, rasa keadilan sosial terancam, dan masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap institusi ekonomi dan politik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu polarisasi politik, protes sosial, dan bahkan konflik internal yang merugikan stabilitas nasional.

Faktor utama penyebab ketimpangan termasuk sistem perpajakan yang regresif, lemahnya redistribusi kekayaan, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan teknologi. Globalisasi juga mempercepat proses akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki akses terhadap modal, informasi, dan pasar

internasional. Sementara itu, pekerja berpendidikan rendah dan usaha kecil seringkali tertinggal dalam persaingan global.

Lembaga internasional seperti OECD, IMF, dan Bank Dunia telah mengakui bahaya ketimpangan ini dan menyerukan berbagai reformasi kebijakan. Beberapa negara telah mulai memperkuat sistem pajak progresif, memperluas jaring pengaman sosial, serta meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja. Namun, perubahan struktural semacam ini membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan yang kuat.

Mengatasi ketimpangan ekonomi membutuhkan pendekatan lintas sektor dan kerja sama global. Tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dibutuhkan strategi redistribusi yang adil dan inklusif. Ekonomi yang lebih merata bukan hanya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas dunia secara keseluruhan.

2. Perubahan Iklim dan Ekonomi Hijau

Perubahan iklim telah menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas ekonomi global. Fenomena ini tidak lagi dianggap sebagai isu lingkungan semata, melainkan telah berdampak nyata terhadap produktivitas pertanian, infrastruktur, kesehatan publik, dan kelangsungan bisnis di berbagai sektor. Banjir, kekeringan, badai ekstrem, serta kenaikan suhu dan permukaan laut menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi banyak negara.

Sektor-sektor utama seperti pertanian, energi, perikanan, dan pariwisata sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Negara-negara dengan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, menjadi pihak yang paling terdampak meskipun kontribusi mereka terhadap emisi

karbon global relatif kecil. Hal ini menimbulkan ketimpangan ekologis yang mengharuskan tanggung jawab lebih besar dari negara-negara maju.

Sebagai respons terhadap krisis iklim, banyak negara dan organisasi internasional mulai mendorong transisi menuju ekonomi hijau atau ekonomi rendah karbon. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, transisi ini memerlukan investasi besar dan reformasi struktural yang kompleks.

Negara maju umumnya lebih siap dalam melakukan transisi ini karena memiliki sumber daya finansial dan teknologi yang memadai. Mereka telah memulai inisiatif seperti carbon pricing, green bonds, dan insentif pajak untuk energi terbarukan. Di sisi lain, negara berkembang sering kali menghadapi dilema antara kebutuhan untuk tumbuh secara ekonomi dan tanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon, padahal teknologi bersih masih mahal dan tidak selalu mudah diakses.

Biaya transisi ke ekonomi hijau sangat tinggi, terutama bagi negara yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk mendukung pembangunan industrinya. Selain investasi dalam infrastruktur hijau, negara-negara tersebut juga memerlukan dukungan untuk membiayai pelatihan tenaga kerja, riset teknologi ramah lingkungan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Tanpa dukungan global, beban ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Kerja sama internasional menjadi sangat penting dalam konteks ini. Perjanjian Paris dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) telah mendorong negara-negara untuk menetapkan target pengurangan

emisi dan investasi dalam energi bersih. Namun, pelaksanaan komitmen ini masih menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakseimbangan pendanaan dan perbedaan kepentingan politik antarnegara.

Selain perubahan struktural pada sistem energi dan transportasi, transformasi ke arah ekonomi hijau juga mencakup perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan, ekonomi sirkular, dan gaya hidup berkelanjutan kini semakin berkembang, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini memberikan dorongan tambahan bagi dunia usaha untuk mengadaptasi praktik produksi yang lebih hijau.

Sektor swasta juga mulai memainkan peran penting dalam ekonomi hijau melalui inovasi dan teknologi. Perusahaan-perusahaan global kini berlomba untuk mencapai net-zero emissions, menggunakan energi terbarukan, serta mengembangkan rantai pasok yang berkelanjutan. Namun, dibutuhkan regulasi yang tegas dan insentif yang tepat agar praktik ini menjadi norma, bukan sekadar strategi pemasaran hijau (greenwashing).

Dengan tekanan global yang meningkat dan kesadaran publik yang terus tumbuh, transisi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Meskipun jalannya tidak mudah, transformasi ini menawarkan peluang besar untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, tahan terhadap krisis, dan ramah terhadap lingkungan. Dalam jangka panjang, keberhasilan transisi ini akan menentukan arah masa depan perekonomian dunia.

3. Geopolitik dan Perdagangan Internasional

Konflik geopolitik global saat ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi dunia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang

terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan ketidakpastian pasar, meningkatkan tarif impor, dan mengganggu rantai pasok global. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut, tetapi juga memengaruhi ekonomi negara lain yang bergantung pada perdagangan dengan kedua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini.

Selain itu, perang Rusia-Ukraina yang mulai berlangsung pada 2022 membawa konsekuensi serius bagi pasokan energi dan komoditas global. Rusia sebagai salah satu eksportir utama minyak dan gas dunia menjadi sumber ketegangan yang menyebabkan kenaikan harga energi secara global. Gangguan pasokan ini berdampak pada biaya produksi dan inflasi di banyak negara, terutama yang sangat bergantung pada impor energi dari kawasan tersebut. Konflik ini juga memperlihatkan betapa geopolitik dapat mengubah pola perdagangan dan aliansi ekonomi secara cepat.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah yang terus berlanjut juga menambah kerumitan dalam stabilitas ekonomi global. Kawasan ini merupakan pusat produksi minyak dunia dan jalur perdagangan strategis yang vital bagi perekonomian internasional. Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata di wilayah ini berpotensi mengganggu pasokan energi dan meningkatkan risiko geopolitik yang akhirnya memicu volatilitas pasar global. Oleh sebab itu, penyelesaian diplomatik dan upaya stabilisasi politik di kawasan ini menjadi sangat penting bagi kelangsungan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia.

4. Krisis Energi dan Komoditas

Krisis energi dan lonjakan harga komoditas telah menjadi perhatian utama dalam perekonomian global, terutama setelah pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina. Ketegangan ini

mengganggu pasokan global minyak, gas, dan pangan, memicu inflasi tinggi di berbagai negara, serta menurunkan daya beli masyarakat. Negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi dan bahan pokok.

Fluktuasi harga energi, khususnya minyak dan gas alam, berdampak langsung pada biaya produksi, distribusi, dan transportasi. Kenaikan harga ini menekan sektor industri dan meningkatkan beban subsidi energi di banyak negara. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas harga dan menjaga keberlanjutan fiskal. Dalam jangka pendek, banyak negara memilih untuk menahan harga melalui subsidi, tetapi hal ini tidak dapat dipertahankan tanpa konsekuensi fiskal yang berat.

Selain energi, harga pangan juga mengalami volatilitas yang tinggi. Gangguan distribusi global, perubahan iklim, dan pembatasan ekspor dari negara produsen menyebabkan kelangkaan serta kenaikan harga bahan pangan strategis seperti gandum, beras, dan minyak nabati. Krisis ini mengancam ketahanan pangan dunia, terutama di wilayah yang sudah rentan terhadap kelaparan dan gizi buruk. Situasi ini mendorong negara untuk memperkuat sistem pangan lokal dan meningkatkan cadangan strategis.

Krisis energi dan komoditas menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber energi dan penguatan sistem pangan berkelanjutan. Transisi menuju energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi menjadi prioritas strategis global. Namun, investasi besar dan penguatan kapasitas teknologi masih menjadi tantangan, khususnya di negara berkembang. Untuk menghadapi ketidakpastian jangka panjang, dunia membutuhkan

pendekatan kolektif yang menyelaraskan ketahanan energi, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan.

C. Kebijakan Ekonomi Global

1. Kebijakan Fiskal dan Moneter Global

Dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi global, peran kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat krusial. Pemerintah melalui kebijakan fiskal menggunakan instrumen seperti belanja negara dan perpajakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau menahan inflasi. Sementara itu, bank sentral menggunakan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan.

Selama krisis global seperti pandemi COVID-19, banyak negara menerapkan stimulus fiskal besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi domestik. Bantuan sosial, subsidi usaha kecil, dan belanja infrastruktur menjadi cara untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Di saat bersamaan, bank sentral menurunkan suku bunga hingga mendekati nol atau bahkan negatif, serta melakukan quantitative easing untuk menyediakan likuiditas dalam sistem keuangan.

Namun, kebijakan yang ekspansif ini memiliki konsekuensi jangka panjang. Inflasi yang tinggi di banyak negara pasca-pandemi menunjukkan bahwa stimulus besar dapat menciptakan tekanan harga jika tidak diimbangi oleh kapasitas produksi yang memadai. Dalam situasi ini, bank sentral seperti Federal Reserve, European Central Bank, dan Bank of England mulai menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan inflasi, meskipun tindakan ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi global. Di tengah globalisasi, kebijakan di satu negara besar dapat menimbulkan efek limpahan (spillover) ke negara lain, terutama melalui jalur arus modal dan nilai tukar. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dan transparansi kebijakan menjadi penting untuk mencegah ketidakseimbangan global dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menghadapi tantangan bersama.

2. Perdagangan Bebas vs Proteksionisme

Perdagangan bebas telah lama dianggap sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi global, dengan memberikan akses pasar yang lebih luas, efisiensi produksi, serta harga barang yang lebih kompetitif bagi konsumen. Melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, negara-negara dapat saling melengkapi keunggulan komparatif mereka dan memperkuat integrasi ekonomi. Organisasi seperti WTO, AFTA, dan Uni Eropa menjadi contoh kerangka kerja perdagangan bebas yang mendorong kerja sama multilateral.

Namun, dalam praktiknya, banyak negara mulai mengadopsi kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan globalisasi. Alasan yang umum digunakan adalah perlindungan terhadap lapangan kerja domestik, stabilitas ekonomi nasional, serta kedaulatan teknologi dan pangan. Bentuk proteksionisme dapat berupa tarif impor, kuota, subsidi domestik, atau bahkan pembatasan investasi asing. Pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik semakin memperkuat dorongan negara untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Perdebatan antara perdagangan bebas dan proteksionisme mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan yang dinamis. Sementara perdagangan bebas dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan

jangka panjang, proteksionisme kadang diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi jangka pendek. Tantangannya adalah merancang kebijakan perdagangan yang adaptif, inklusif, dan memperhatikan dampak distribusional, agar manfaat globalisasi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Kebijakan Ketahanan Ekonomi

Pandemi COVID-19 menjadi momentum penting yang mengungkap kelemahan struktur ekonomi global, terutama dalam hal ketahanan rantai pasok dan sistem layanan publik. Gangguan pada distribusi barang penting seperti alat kesehatan, pangan, dan bahan baku industri menimbulkan efek domino terhadap produksi dan konsumsi di seluruh dunia. Banyak negara mengalami kekurangan pasokan karena terlalu bergantung pada impor dari wilayah tertentu, sehingga muncul kesadaran perlunya diversifikasi dan relokasi sumber produksi.

Krisis ini juga menyoroti urgensi reformasi sistem kesehatan dan perlindungan sosial. Negara-negara dengan sistem layanan kesehatan yang kuat dan jaring pengaman sosial yang memadai terbukti lebih tangguh menghadapi dampak ekonomi pandemi. Sebagai respons, banyak pemerintah meningkatkan investasi di bidang kesehatan masyarakat, memperluas cakupan jaminan sosial, serta memperkuat sistem logistik dan infrastruktur esensial untuk menghadapi bencana serupa di masa depan.

Kebijakan ketahanan ekonomi kini menjadi prioritas dalam perencanaan jangka menengah dan panjang. Selain mencakup aspek kesehatan dan logistik, ketahanan ekonomi juga menyentuh isu ketahanan pangan, energi, dan teknologi. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif antarnegara diperlukan untuk membangun sistem ekonomi global yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Krisis global berikutnya

mungkin tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan yang lebih baik dan kebijakan yang responsif.

D. Peran Lembaga Internasional

Lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran sentral dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. IMF dan Bank Dunia menyediakan bantuan keuangan, teknis, serta kebijakan bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Sementara itu, WTO bertugas mengatur sistem perdagangan multilateral, mendorong penyelesaian sengketa, dan mengawasi pelaksanaan perjanjian dagang internasional. PBB, melalui lembaga-lembaga seperti UNCTAD dan UNEP, turut mengarusutamakan isu pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan ketimpangan global dalam forum kebijakan internasional.

Meski memiliki mandat global, efektivitas lembaga-lembaga ini kerap dipertanyakan, terutama karena struktur pengambilan keputusannya yang dianggap bias terhadap kepentingan negara-negara maju. Dalam IMF dan Bank Dunia, misalnya, kekuatan voting yang didasarkan pada kontribusi keuangan menyebabkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat memiliki pengaruh dominan. Akibatnya, kebijakan dan program bantuan yang diberikan sering kali dianggap tidak cukup memperhatikan konteks dan kebutuhan lokal negara berkembang, bahkan memperburuk ketimpangan struktural.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti krisis iklim, konflik geopolitik, dan disrupsi digital, reformasi kelembagaan internasional menjadi semakin mendesak. Dunia membutuhkan lembaga multilateral yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap

tantangan zaman. Untuk menjaga relevansi dan legitimasi, lembaga-lembaga internasional harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi negara-negara berkembang dan masyarakat sipil, serta memperkuat komitmen terhadap prinsip keadilan ekonomi global.

E. Tantangan dan Peluang

1. Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam membentuk wajah baru perekonomian global. Teknologi seperti internet, kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT) telah membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Sektor-sektor seperti e-commerce, teknologi finansial (fintech), pendidikan daring, dan layanan digital tumbuh pesat, mengubah cara orang bekerja, berbelanja, belajar, dan berinteraksi. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan memperluas akses pasar lintas batas negara.

Perkembangan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas dan inovasi, serta menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang teknologi dan kreatif. Namun, di sisi lain, transformasi digital juga menggeser pola kerja tradisional dan menimbulkan disrupsi di berbagai sektor, seperti manufaktur dan jasa konvensional. Otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan rutin, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang pengangguran struktural dan perlunya peningkatan keterampilan (reskilling) tenaga kerja.

Selain itu, ketimpangan digital menjadi tantangan besar, baik antarnegara maupun antarwilayah dalam satu negara. Negara-negara maju dan masyarakat perkotaan menikmati manfaat besar dari konektivitas dan akses teknologi, sementara negara berkembang dan

wilayah pedesaan sering kali tertinggal karena keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, dan rendahnya literasi digital. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses peluang ekonomi dan memperparah ketimpangan sosial.

Untuk memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat inklusif, pemerintah dan lembaga internasional perlu mendorong kebijakan yang memperluas akses teknologi, membangun infrastruktur digital, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan digital. Dengan pendekatan yang tepat, ekonomi digital dapat menjadi motor pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

2. Urbanisasi dan Demografi

Pertumbuhan penduduk dunia yang terus berlangsung, terutama di kawasan Asia dan Afrika, memicu laju urbanisasi yang pesat. Kota-kota besar berkembang menjadi pusat ekonomi, inovasi, dan peluang kerja, menarik migrasi dari daerah pedesaan. Urbanisasi ini mendorong pertumbuhan sektor jasa dan industri, sekaligus menciptakan tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur, perumahan, transportasi, dan layanan publik yang memadai. Jika tidak dikelola dengan baik, urbanisasi cepat dapat menimbulkan kemacetan, polusi, kemiskinan perkotaan, serta ketimpangan sosial yang tinggi.

Sementara itu, negara-negara maju menghadapi fenomena penuaan populasi yang signifikan akibat tingkat kelahiran yang rendah dan peningkatan harapan hidup. Penuaan ini memberikan tekanan pada pasar tenaga kerja karena jumlah pekerja produktif berkurang, sementara kebutuhan akan layanan kesehatan dan jaminan sosial meningkat. Sistem pensiun dan jaminan sosial harus diadaptasi untuk menjaga

keberlanjutan keuangan dan memastikan kesejahteraan lansia tanpa membebani generasi muda secara berlebihan.

Dinamika demografi ini menuntut perencanaan kebijakan yang responsif dan inovatif, seperti pengembangan kota cerdas (smart cities), peningkatan efisiensi layanan publik, serta reformasi sistem sosial dan ketenagakerjaan. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan teknologi menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi penduduk muda di negara berkembang dan mengelola konsekuensi penuaan di negara maju. Dengan demikian, perubahan demografi dan urbanisasi dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Ekonomi Berkelanjutan

Tantangan utama perekonomian global di masa depan adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekologis dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan hilangnya sumber daya alam penting. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan kini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional.

Ekonomi berkelanjutan menuntut integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini mendorong pemanfaatan sumber daya yang efisien, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan terhadap ekosistem. Selain itu, inklusivitas menjadi elemen penting agar manfaat pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok rentan. Penerapan ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan

inovasi hijau menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tujuan ini.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bersinergi untuk membangun kerangka kerja yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Kebijakan fiskal hijau, insentif investasi pada teknologi ramah lingkungan, serta edukasi publik tentang pentingnya kelestarian menjadi bagian dari strategi nasional dan global. Dengan upaya bersama, perekonomian global diharapkan dapat tumbuh secara stabil, adil, dan tetap menjaga kelestarian bumi untuk generasi mendatang.

F. Prospek Masa Depan Perekonomian Global

Prospek jangka panjang perekonomian global bergantung pada kolaborasi internasional, stabilitas politik, inovasi teknologi, dan kebijakan berkelanjutan. Pertumbuhan diprediksi melambat di negara maju, namun tetap tinggi di Asia dan Afrika. Organisasi OECD dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berkisar antara 2,5-3% per tahun dalam dekade mendatang, dengan peningkatan peran negara berkembang sebagai motor penggerak baru.

G. Kesimpulan

Perekonomian global saat ini berada di persimpangan penting yang penuh tantangan dan peluang. Berbagai isu besar seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, serta konflik geopolitik memberikan tekanan yang kuat pada sistem ekonomi dunia. Tantangan ini tidak hanya bersifat lokal atau nasional, tetapi berskala global sehingga memerlukan respons kebijakan yang adaptif, fleksibel, dan terutama berbasis kerja sama antarnegara.

Dalam menghadapi ketimpangan ekonomi, penting bagi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat secara merata. Demikian pula, isu

perubahan iklim memaksa dunia untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau yang rendah karbon dan berkelanjutan, walaupun proses transisi ini memerlukan biaya dan komitmen yang besar, terutama bagi negara berkembang.

Konflik geopolitik dan krisis energi menjadi pengingat bahwa stabilitas politik dan keamanan juga menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya diplomasi, dialog, dan penguatan lembaga internasional harus terus diperkuat agar ekonomi dunia dapat bergerak pada jalur yang stabil dan harmonis. Peran lembaga internasional, meskipun masih menghadapi kritik, tetap vital sebagai fasilitator kerja sama global.

Meski tantangan yang dihadapi sangat besar, masa depan perekonomian global tetap menjanjikan dengan dukungan inovasi teknologi, transformasi digital, dan pendekatan ekonomi yang inklusif. Kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, kolaborasi multilateral, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan makmur bagi semua. Dengan komitmen bersama, ekonomi global dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mampu menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

Referensi

- Krugman, P., & Obstfeld, M. (2018). International Economics: Theory and Policy. Pearson.
- Stiglitz, J. E. (2020). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton.
- IMF. (2023). World Economic Outlook Report. <https://www.imf.org>
- World Bank. (2022). Global Economic Prospects. <https://www.worldbank.org>
- Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox. W. W. Norton & Company.
- Sachs, J. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.

Bab 10

Dampak Krisis Global Terhadap Ekonomi Dunia

(Juju Zuhriatusobah)

Dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam, perekonomian dunia kini lebih terhubung dan saling bergantung dari sebelumnya. Kondisi ini membuat suatu krisis yang terjadi di satu wilayah berpotensi memicu efek domino yang meluas ke berbagai negara dan sektor. Berbagai krisis global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia. Krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi menjadi tiga isu utama yang saling berkaitan dan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara global. Krisis keuangan memicu ketidakpastian pasar dan penurunan investasi, sementara krisis pangan memperburuk kondisi sosial-ekonomi, terutama di negara berkembang. Di sisi lain, krisis energi turut memperbesar tekanan terhadap biaya produksi dan distribusi barang, serta memperburuk ketimpangan akses terhadap sumber daya. Melalui analisis komprehensif terhadap interaksi ketiga krisis tersebut, dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan struktural yang dihadapi dunia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

A. Krisis Keuangan

Krisis keuangan belakangan ini menjadi lebih sering terjadi sejak era globalisasi. Negara-negara yang mengalami krisis tidak saja di Amerika latin, Asia, Eropa,

tetapi juga melanda Amerika Serikat. Krisis keuangan Amerika Serikat merambah ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme mengalami krisis keuangan.

Salah satu alasan utama terjadinya krisis global adalah kemajuan dalam teknologi informasi yang memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke negara lain. Alasan lain adalah perkembangan pesat dari sektor keuangan. Sistem keuangan yang terintegrasi, timbulnya gangguan keuangan domestik di satu negara dapat mengakibatkan efek domino dengan cara mengacaukan ekonomi terintegrasi lainnya yang mengarah kepada kekacauan keuangan global.

Krisis keuangan ditandai dengan mengeringnya likuiditas keuangan yang dimiliki negara yang terkena krisis dan berdampak pada ketidakmampuan negara tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karenanya, penanganan krisis memerlukan tersedianya likuiditas yang mencukupi bagi negara atau kawasan yang terkena krisis, dan semakin besar dampak krisis semakin meningkat pula dana likuiditas yang dibutuhkan.

Keringnya likuiditas di sektor perbankan dan pasar keuangan berdampak pada tidak berjalannya fungsi mediasi perbankan dalam menerima tabungan dan menyalurkannya ke sektor produksi. Kondisi ini bila terus terjadi akan berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi, pertumbuhan yang menurun, dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Dana likuiditas semata tidak mencukupi untuk mengatasi krisis, dan diperlukan pula paket program yang berisikan berbagai reformasi kebijakan fiskal dan moneter yang harus dijalankan suatu negara. Dengan melaksanakan berbagai program tersebut, faktor-faktor penyebab timbulnya krisis dapat dihilangkan atau

dikurangi risikonya, dan pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Dengan demikian, negara terkena krisis dapat cepat pulih dari krisis, dan mengembalikan talangan pinjaman yang diterima. Penyediaan dana likuiditas yang mencukupi untuk tindakan preventif dan penanganan krisis berikut paket program yang perlu dijalankan oleh negara terkena krisis merupakan peran yang dijalankan oleh *International Monetary Fund* (IMF).

Dana likuiditas yang perlu disiapkan oleh IMF akan semakin meningkat seiring dengan besarnya dampak yang ditimbulkan dan jumlah negara yang membutuhkan bantuan IMF. Permasalahan akan timbul ketika IMF tidak mampu menyediakan dana likuiditas yang dibutuhkan untuk penanganan krisis. Hal tersebut terjadi mana kala jumlah modal dan sumber keuangan IMF lainnya lebih kecil dari dana likuiditas yang perlu disediakan dalam penyelesaian krisis global (Ampri, 2020).

B. Krisis Pangan Dunia

Menurut UU Nomor 18 tahun 2012, krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Krisis pangan adalah keadaan yang berbahaya, keadaan yang tidak stabil, dan semua krisis yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, serta air yang ditujukan untuk konsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. Krisis pangan selalu diawali dengan tingginya harga pangan. Naiknya harga pangan global mempengaruhi konsumsi pangan di negara berkembang. Naiknya harga komoditas, terutama energi dan pangan, mendorong inflasi di dalam negeri, dan

semakin sedikit pilihan pangan yang tersedia, semakin besar risiko krisis pangan.

Krisis pangan bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat berbagai peristiwa yang mengakibatkan kelaparan massal dan krisis pangan. Salah satu yang paling terkenal adalah “Krisis Pangan Global 1970-an,” yang dipicu oleh kombinasi berbagai faktor seperti cuaca buruk, lonjakan harga minyak, konflik geopolitik, pertumbuhan populasi yang cepat, perubahan iklim, dan kebijakan pertanian yang kurang efektif. Krisis ini terasa hingga di negara-negara berkembang, dimana kelaparan dan malnutrisi meningkat.

Guna menghadapi krisis pangan yang semakin parah waktu itu, Majelis Umum PBB memutuskan menyelenggarakan konferensi Pangan Dunia yang diadakan di Roma dari tanggal 5 sampai 16 November 1974 dan dihadiri oleh perwakilan dari 133 negara. Konferensi tersebut menghasilkan upaya para negara-negara untuk meningkatkan produksi pangan, termasuk Program Pangan Dunia (*World Food Programme* atau WFP) dan berbagai inisiatif pertanian di negara-negara berkembang. Juga, munculnya revolusi hijau serta menginisiasi untuk mengalokasikan anggaran khusus ketahanan pangan (Pratama, 2024).

Peristiwa sejarah memang bisa terulang, tetapi tidak akan sama persis dengan peristiwa sebelumnya. Belajar dari krisis pangan 1970, faktor-faktor yang menjadi penyebab krisis pangan di tahun 1970 sudah mulai bermunculan saat ini. Mulai dari perubahan iklim, lonjakan harga minyak, hingga konflik geopolitik. Namun, ada faktor pembeda saat ini yaitu pengalaman, manusia yang telah belajar dari sejarah.

Laporan Global tentang Krisis Pangan (*Global Report on Food Crises* atau GRFC) 2024 menegaskan betapa besarnya tantangan untuk mengakhiri kelaparan pada

tahun 2030. Pada tahun 2023, hampir 282 juta orang atau 21,5 persen dari populasi yang berada di 59 negara/wilayah menghadapi tingkat kerawanan pangan yang memerlukan bantuan pangan dan mata pencaharian yang mendesak. Ditambah lagi anomali cuaca seperti hujan dan kekeringan ekstrim yang menyebabkan gagal panen sehingga menurunkan produksi bahan baku pangan di dunia.

Selain itu, konflik geopolitik dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan. Contoh saja yang terbaru ini yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan ketidakstabilan harga gandum dan CPO. Kita diingatkan peristiwa dua tahun, dimana konflik antar dua negara tersebut mempengaruhi harga bahan pokok pangan di dunia. Pada awal perang, harga gandum global melonjak hingga 28%. Sebagai dua negara produsen besar gandum dan biji-bijian yang mencakupi 30% ekspor gandum dunia, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan kapasitas produksi tidak dapat sepenuhnya diganti oleh negara produsen lain sehingga menurunnya ketersediaan dan menyebabkan naiknya harga gandum. Risiko serupa berpotensi terjadi baik terhadap komoditas yang diekspor oleh kedua negara tersebut maupun yang diimpornya.

Peningkatan populasi manusia di dunia juga menjadi kekhawatiran penyebab krisis pangan. Saat ini, pertumbuhan populasi dunia tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas pangan. Diperkirakan pada tahun 2050, populasi global akan mencapai 10 miliar orang, dan membutuhkan peningkatan produksi pangan sebesar 60%. Dan kembali lagi ke masalah perubahan iklim. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi tiap-tiap negara untuk memicu inovasi dalam sektor pertanian guna menggenjot produktivitas pada situasi perubahan iklim yang ekstrem. Inovasi memerlukan biaya, sehingga perlu anggaran khusus untuk memitigasi krisis pangan.

Gejolak harga pangan global yang disebabkan oleh perpaduan gangguan suplai, peningkatan biaya produksi, dan peningkatan permintaan diprediksi akan mengkondisikan peningkatan harga pangan ke tingkat yang lebih tinggi dan berlangsung lebih lama. Gangguan suplai pangan terjadi dari perpaduan antara :

1. Gangguan produksi akibat perubahan iklim dan tingginya harga pupuk;
2. Gangguan distribusi pangan akibat peningkatan harga energi dan pembatasan jalur perdagangan melalui laut Hitam; dan
3. Kebijakan untuk mengutamakan kebutuhan domestik (*safety first*). Peningkatan biaya produksi yang dipicu oleh peningkatan harga pupuk dan energi dikhawatirkan akan memicu *cost push inflation*, yang apabila berlangsung lama dapat mengkondisikan tingkat keseimbangan harga baru yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Peningkatan permintaan pangan global utamanya dipicu untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, bahan baku, serta pemulihan dan penguatan stok pangan. Ada tiga aspek utama yang akan dialami karena menjadi pemicu utama peningkatan harga pangan di pasar global maupun domestik, yaitu:

1. Gangguan suplai pangan ke pasar global, sebagai akibat gangguan produksi, distribusi, dan kebijakan “*safety first*”.
2. Peningkatan biaya produksi, sebagai akibat dari meningkatnya harga pupuk dan energi.
3. Peningkatan permintaan pangan global, yang dipicu oleh *recovery* ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan pengisian stok pangan yang terkuras akibat situasi pangan saat ini.

Ketidakseimbangan kemampuan finansial antara negara maju dengan negara berkembang dan tertinggal,

dikhawatirkan akan memicu krisis pangan, utamanya di negara tertinggal (*less develop*). Untuk itu, lembaga PBB berinisiatif membentuk *Global Crisis Response Group on Food, Energi, and Financial* (GCRG) yang bertujuan untuk mendorong konsensus global serta advokasi solusi untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan finansial (Wahida *et al.*, 2022).

Terdapat keterkaitan antara krisis pangan, energi dan finansial. Krisis pangan diawali oleh krisis energi (kenaikan harga minyak dan pengembangan bioenergy yang memicu kelangkaan pangan dan kenaikan harga pangan. Penurunan harga minyak dan krisis finansial yang diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi global telah mendorong penurunan harga pangan, sehingga memunculkan fenomena baru yaitu krisis harga pangan. Krisis pangan dan finansial secara simultan berdampak terhadap ketahanan pangan, ketahanan politik, dan stabilitas finansial/ekonomi nasional dan Kawasan.

Antisipasi kebijakan global dalam merespon dampak krisis PEF (pangan-energi-finansial) adalah pengembangan pertanian skala kecil dalam perspektif pertumbuhan dan pemerataan yang mencakup tiga aspek kebijakan sebagai berikut:

1. Pemantapan stabilitas makro ekonomi dan anggaran pembangunan sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur perdesaan;
2. Pengembangan produksi berbasis potensi pasar yang dikomplemen dengan perbaikan sistem dan efisiensi pemasaran produk pertanian; dan
3. Pengembangan inovasi kelembagaan dan sistem insentif dalam mendukung ketersediaan dan akses sarana produksi utama dan jasa pelayanan pengembangan usaha tani skala kecil.

C. Krisis Energi

Krisis energi mengacu pada kondisi langkanya pasokan energi yang dibutuhkan masyarakat dan industri. Kondisi ini sering kali ditandai dengan lonjakan harga yang tajam.

Sejarah mencatat beberapa krisis besar, seperti krisis minyak 1973 dan krisis energi global pada 2022 akibat konflik geopolitik. Fenomena ini memperlihatkan betapa rentannya ekonomi dunia terhadap dinamika sektor energi. Lonjakan harga pangan dan energi di tingkat global mulai terasa. Perekonomian di berbagai negara melambat dan Indonesia tidak imun terhadap perlambatan tersebut.

Saat masih berjuang keluar dari derita efek pandemi Covid-19, ekonomi dunia dikejutkan dengan eskalasi geopolitik Rusia dan Ukraina yang makin menekan. Konflik kedua negara tersebut tak hanya menimbulkan korban manusia karena serangan bersenjata, namun juga ekonomi global. Namun, ekonomi dunia masih harus menghadapi tantangan besar di depan, yaitu stagflasi. Inflasi terus meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi diprediksi terus menyusut. Penyebab pertama dari tingginya inflasi adalah tingginya harga komoditas. Harga komoditas energi naik tinggi karena pasokan langka akibat pandemi, diperparah oleh konflik Rusia dan Ukraina (Bachtiar, 2022) . Beberapa penyebab utama krisis energi antara lain:

1. Ketergantungan pada energi fosil, terutama minyak dan gas.
2. Ketegangan geopolitik, seperti perang atau embargo energi.
3. Ketidakseimbangan permintaan dan pasokan, akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat atau penundaan investasi energi.
4. Kurangnya diversifikasi energi, terutama di negara berkembang.

5. Transisi energi yang belum merata, yang membuat negara kekurangan solusi cadangan ketika energi fosil dibatasi.

Krisis energi adalah tantangan kompleks yang memerlukan langkah-langkah tegas dan terintegrasi untuk mengatasi akar penyebabnya dan memitigasi dampak negatifnya. Berikut adalah sejumlah solusi dan upaya yang dapat diambil untuk mengatasi krisis energi :

1. Transisi ke Energi Terbarukan

Peralihan dari sumber energi konvensional yang berbasis pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan adalah langkah kunci dalam mengatasi krisis energi. Energi matahari, angin, air, dan geotermal adalah contoh energi terbarukan yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dan ketersediaan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah, perusahaan, dan individu perlu meningkatkan investasi dalam teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air.

2. Efisiensi Energi

Peningkatan efisiensi energi adalah cara lain untuk mengurangi krisis energi. Ini mencakup penggunaan perangkat yang lebih efisien, perencanaan transportasi yang cerdas, dan desain bangunan yang ramah lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengganti lampu hemat energi, mengisolasi rumah, dan meminimalkan limbah energi dapat berkontribusi signifikan pada pengurangan konsumsi energi.

3. Diversifikasi Sumber Energi

Diversifikasi sumber energi adalah strategi penting untuk mengurangi risiko krisis energi. Mengandalkan berbagai sumber energi, termasuk energi nuklir, energi hidrogen, dan biomassa, dapat membantu menjaga pasokan energi yang stabil. Diversifikasi juga dapat

meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan.

4. **Pengembangan Infrastruktur Energi yang Berkelanjutan**
Investasi dalam infrastruktur energi yang lebih modern, efisien, dan andal adalah langkah kunci dalam mengatasi krisis energi. Pembaruan jaringan listrik, pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, dan investasi dalam penyimpanan energi yang canggih adalah beberapa contoh tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan infrastruktur energi.
5. **Kebijakan dan Regulasi yang Tepat**
Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatasi krisis energi melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Ini mencakup insentif fiskal untuk energi terbarukan, pengaturan emisi karbon, dan standar efisiensi energi. Regulasi yang ketat terhadap emisi karbon dapat mendorong perusahaan untuk mencari solusi yang lebih ramah lingkungan.
6. **Inovasi Teknologi**
Pengembangan teknologi baru dalam penyimpanan energi, penggunaan energi yang lebih efisien, dan manajemen jaringan energi yang lebih pintar dapat berperan besar dalam mengatasi krisis energi. Ini mencakup pengembangan baterai yang lebih efisien, jaringan listrik cerdas yang dapat mengatur konsumsi energi dengan lebih baik, dan transportasi berbasis bahan bakar terbarukan.
7. **Kesadaran Publik**
Peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya penghematan energi dan penggunaan sumber energi terbarukan juga merupakan faktor penting dalam mengatasi krisis energi. Program edukasi dan kampanye informasi dapat membantu masyarakat memahami dampak konsumsi energi mereka dan mendorong tindakan yang lebih berkelanjutan.

Referensi

- Ampri, I. (2020) 'Arsitektur Keuangan Internasional: Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global', *Kementerian Keuangan*, pp. 1-13.
- Bachtiar, A. (2022) 'KRISIS EKONOMI DUNIA 2022'.
- M, A. *et al.* (2022) 'REVIEW: KRISIS PANGAN DUNIA DAN INDONESIA', *Prosiding Seminar Nasional BSKJI "Post Pandemic Economy Recovery"*, pp. 11-18. Available at: www.sciencedirect.com,.
- Mengapa Krisis Energi Menjadi Ancaman Serius untuk Ekonomi Dunia?* (2025). Available at: <https://pgnIng.co.id/berita/wawasan/dampak-krisis-energi/> (Accessed: 31 May 2025).
- Pratama, R.A. (2024) *Menjaga Ketahanan Pangan dari Krisis Pangan - Media Keuangan*. Available at: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menjaga-ketahanan-pangan-dari-krisis-pangan> (Accessed: 30 May 2025).
- Pristiwiyanto (2020) 'Ekonomi Syariah Solusi Krisis Keuangan Global', 08(01).
- Rusastra, I.W., Saliem, H.P. and Ashari, A. (2016) 'Krisis Global Pangan-Energi-Finansial: Dampak dan Respon Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(1), p. 29. Available at: <https://doi.org/10.21082/akp.v8n1.2010.29-48>.
- Wahida *et al.* (2022) 'Mewaspada Dampak Situasi Pangan Global Terhadap Sektor Pertanian Indonesia', *Psekp.Setjen.Pertanian.Go.Id*, pp. 1-8. Available at:

<https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/wp-content/uploads/2024/01/PSEKP-PB-05-2022-Waspada-Krisis-Pangan.pdf>.

Waruwu, B.M. (2023) 'Krisis Energi dan Harga Minyak Stabilitas Pasar dan Dampak Terhadap Ekonomi Dunia', *Circle Archive*, 1(2), pp. 1-13. Available at: <http://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/42%0Ahttp://circle-archive.com/index.php/carc/article/download/42/46>.

Biodata Penulis



Juju Zuhriatusobah. Penulis lahir di Indramayu pada tahun 1962. Penulis menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di kota kelahirannya, yaitu Indramayu. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil program Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara, Bandung. Dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalnya, penulis melanjutkan pendidikan magisternya di STIE UNPAS Bandung dengan konsentrasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Pengalaman pendidikan tersebut semakin memperkaya wawasannya dalam bidang manajemen dan ekonomi. Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara, Bandung. Dalam dunia akademik, ia aktif dalam pengajaran, pembimbingan, serta pengembangan ilmu manajemen, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan perkembangan organisasi bisnis.

Bab 11

Prospek Ekonomi Global di Masa Depan

A. Pendahuluan

Ekonomi global terus mengalami transformasi yang cepat seiring dengan perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, perubahan iklim, serta pergeseran perilaku masyarakat. Revolusi digital, otomatisasi industri, serta integrasi pasar global telah mengubah cara negara, perusahaan, dan individu berinteraksi dalam sistem ekonomi internasional. Masa depan ekonomi dunia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi juga oleh faktor-faktor non-ekonomi yang semakin penting, seperti:

1. Stabilitas politik: Konflik, ketegangan antarnegara, dan perubahan rezim politik dapat memengaruhi perdagangan, investasi, dan kepercayaan pasar global.
2. Inovasi teknologi: Kemampuan negara dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan energi terbarukan, menentukan daya saing jangka panjang.
3. Kebijakan lingkungan: Tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan menerapkan ekonomi hijau akan memengaruhi industri, investasi, dan pola konsumsi.
4. Keberlanjutan sosial: Isu ketidaksetaraan ekonomi, akses pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan pertumbuhan yang inklusif.
5. Dalam konteks ini, memproyeksikan prospek ekonomi global di masa depan memerlukan analisis

komprehensif terhadap tren jangka panjang, ketahanan sistem ekonomi, dan potensi disrupsi yang dapat mengubah keseimbangan global. Pemahaman mendalam mengenai interaksi antara teknologi, geopolitik, lingkungan, dan demografi menjadi kunci untuk merumuskan strategi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan bagi negara-negara di seluruh dunia.

B. Tren Utama Ekonomi Global di Masa Depan

1. Digitalisasi dan Ekonomi Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), blockchain, big data, dan Internet of Things (IoT), akan menjadi motor penggerak utama ekonomi global. Negara yang mampu menguasai teknologi ini akan mendominasi rantai nilai global. Digitalisasi juga akan mempercepat otomatisasi industri, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan model bisnis baru berbasis platform. Namun, digitalisasi juga berpotensi memperlebar kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang.

2. Perubahan Demografi dan Pasar Tenaga Kerja

Populasi dunia diproyeksikan mencapai lebih dari 9 miliar pada tahun 2050. Negara-negara dengan populasi besar seperti India, Indonesia, dan Nigeria akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global, berkat bonus demografi. Sebaliknya, negara-negara maju seperti Jepang dan sebagian besar Eropa akan menghadapi tantangan penuaan penduduk yang berdampak pada produktivitas dan sistem jaminan sosial.

3. Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Kesadaran terhadap perubahan iklim mendorong dunia untuk beralih ke energi terbarukan. Transisi menuju ekonomi hijau (green economy) akan membuka peluang investasi besar pada sektor energi terbarukan,

mobil listrik, pertanian berkelanjutan, serta industri ramah lingkungan. Namun, peralihan ini juga dapat menimbulkan konflik geopolitik baru terkait akses dan kontrol atas sumber daya mineral kritis seperti lithium, kobalt, dan nikel.

4. Perdagangan Global dan Regionalisasi

Masa depan perdagangan global akan ditandai dengan dua tren yang berlawanan: globalisasi dan regionalisasi. Di satu sisi, perdagangan internasional tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi; di sisi lain, ketegangan geopolitik mendorong negara-negara membentuk blok ekonomi regional seperti ASEAN, Uni Eropa, atau African Continental Free Trade Area. Regionalisasi ini dapat mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rapuh akibat pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik.

5. Ketidakpastian Geopolitik

Konflik geopolitik, rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat-Tiongkok-Rusia, serta potensi perang dagang, akan tetap menjadi faktor risiko utama ekonomi global. Ketidakpastian geopolitik memengaruhi harga energi, komoditas, serta aliran investasi internasional. Hal ini membuat stabilitas politik menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi global.

C. Tantangan Ekonomi Global di Masa Depan

1. Ketidaksetaraan Ekonomi

Meski digitalisasi dan globalisasi membuka peluang besar, distribusi manfaat ekonomi masih timpang. Kesenjangan antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin, diperkirakan semakin melebar bila tidak diimbangi dengan kebijakan inklusif.

2. Ketahanan Pangan

Perubahan iklim, urbanisasi, dan meningkatnya populasi dunia menimbulkan tekanan terhadap sistem pangan global. Krisis pangan akan menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui inovasi pertanian, efisiensi rantai pasok, serta distribusi pangan yang adil.

3. Krisis Lingkungan

Pemanasan global, polusi, dan degradasi lingkungan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Kegagalan mengelola isu lingkungan dapat menimbulkan bencana besar yang merusak infrastruktur dan ekonomi.

4. Disrupsi Teknologi terhadap Tenaga Kerja

Otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat menggantikan jutaan pekerjaan tradisional. Tantangan terbesar adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja global agar mampu beradaptasi dengan keterampilan baru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

D. Peluang Ekonomi Global di Masa Depan

1. Ekonomi Digital dan Inovasi

E-commerce, fintech, teknologi kesehatan (health-tech), serta teknologi pendidikan (ed-tech) akan tumbuh pesat. Negara berkembang memiliki peluang untuk menjadi pusat inovasi baru bila mampu mengembangkan ekosistem digital yang inklusif.

2. Ekonomi Sirkular (Circular Economy)

Konsep daur ulang, efisiensi energi, dan pemanfaatan kembali sumber daya akan menjadi strategi utama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Ekonomi sirkular tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menciptakan peluang usaha baru.

3. Investasi pada Infrastruktur Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur hijau, transportasi berkelanjutan, serta energi bersih akan menjadi prioritas. Proyek-proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung pertumbuhan jangka panjang yang inklusif.

4. Ekonomi Kreatif dan Budaya

Di era globalisasi digital, ekonomi kreatif berbasis budaya, seni, media, dan hiburan memiliki potensi besar. Industri kreatif dapat menjadi keunggulan kompetitif negara-negara dengan warisan budaya yang kuat, seperti Indonesia.

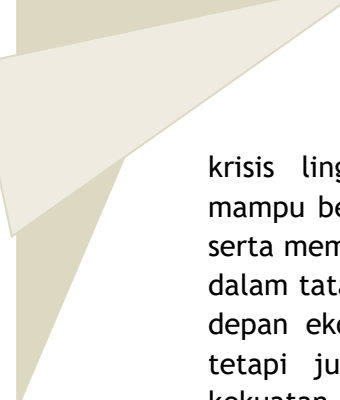
E. Peran Indonesia dalam Ekonomi Global Masa Depan

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan anggota G20, Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi global. Bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional memberikan peluang besar. Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi melalui:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.
2. Percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
3. Diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada komoditas mentah.
4. Investasi pada energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan.
5. Penguatan diplomasi ekonomi internasional.

F. Kesimpulan

Prospek ekonomi global di masa depan ditentukan oleh interaksi antara peluang besar yang ditawarkan oleh teknologi, inovasi, dan transisi menuju ekonomi hijau, serta tantangan berat berupa ketidakpastian geopolitik,



krisis lingkungan, dan ketidaksetaraan. Negara yang mampu beradaptasi dengan cepat, mengantisipasi risiko, serta memanfaatkan peluang akan menjadi pemain utama dalam tatanan ekonomi global baru. Bagi Indonesia, masa depan ekonomi global bukan hanya sekadar tantangan, tetapi juga peluang untuk menegaskan diri sebagai kekuatan ekonomi baru dunia, asalkan mampu mengelola potensi domestik dan berperan aktif dalam percaturan internasional.

Referensi

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
- Friedman, G. (2009). *The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century*. Anchor Books.
- IMF. (2023). *World Economic Outlook: Navigating Uncertainties*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- McKinsey Global Institute. (2021). *The Future of Work in a Post-Pandemic World*. McKinsey & Company.
- OECD. (2022). *Global Economic Outlook 2022*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
- World Bank. (2023). *Global Economic Prospects: Navigating Global Shocks*. Washington, DC: The World Bank.
- WEF (World Economic Forum). (2022). *Global Risks Report 2022*. Geneva: World Economic Forum.

Perekonomian Global: Isu, Kebijakan, dan Prospek Masa Depan

Buku Perekonomian Global: Isu, Kebijakan, dan Prospek Masa Depan hadir sebagai panduan komprehensif untuk memahami dinamika ekonomi dunia yang terus berubah dengan cepat. Menggabungkan analisis teoritis dan praktis, buku ini membahas isu-isu utama yang memengaruhi perekonomian global, mulai dari pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, fluktuasi mata uang, hingga dampak teknologi dan perubahan iklim.

Selain itu, buku ini menelaah kebijakan ekonomi yang diambil oleh berbagai negara dan lembaga internasional dalam menghadapi tantangan global, termasuk strategi mitigasi krisis, regulasi perdagangan, dan inovasi finansial. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini juga menawarkan prospek masa depan perekonomian dunia, menyoroti peluang, risiko, dan tren yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku bisnis.

Ditulis dengan bahasa yang jelas dan analisis yang mendalam, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana keputusan ekonomi di tingkat global memengaruhi kehidupan sehari-hari dan perkembangan ekonomi nasional.



Cendekia Publisher
Jl: Royal Sentraland BTP Makassar
Email: cendekiapublisher03@gmail.com

